

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2025



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun maksud disusunnya LKjIP ini adalah :

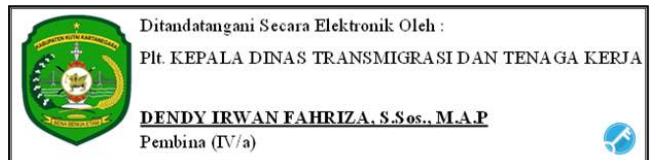
- a. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
- b. Sebagai wujud pertanggung jawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat.
- c. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.
- d. Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien



dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 27 Februari 2025





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.4. Permasalahan dan Isu Strategis.....	3
I.5. Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah.....	5
I.6. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	5
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 9
II.1. Perencanaan Strategis	9
II.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	9
II.1.2. Tujuan dan Sasaran	11
II.1.3. Strategis	12
II.1.4. Arah Kebijakan.....	12
II.1.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025	17
II.3.1. Alokasi Anggaran Belanja.....	17
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran	18
II.3.3. Alokasi Anggaran Per Program.....	19
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	 20
III.1. Capaian Kinerja.....	20
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28



III.3.	Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Kabupaten Kutai Kartanegara	34
III.3.1.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	37
III.3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dok. Perencanaan Strategis	38
III.3.3.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
III.3.4.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	41
III.4.	Realisasi Anggaran Tahun 2025	49
BAB	IV. PENUTUP	52
IV.1.	Kesimpulan	52
IV.2.	Perbaikan Kedepan	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai & PPPK Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	6
Tabel 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	10
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	11
Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
Tabel 2.4. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025	14
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2025	16
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Tahun 2025	17
Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025.....	18
Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025	18
Tabel 2.9. Alokasi Anggaran Belanja Per Program Tahun 2025.....	19
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ...	23
Tabel 3.3. Rumusan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	28
Tabel 3.4. Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja PD Tahun 2025.....	29
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja.....	29
Tabel 3.6. Rumusan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja	30
Tabel 3.7. Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	30
Tabel 3.8. Rumusan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	30
Tabel 3.9. Capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.....	31
Tabel 3.10. Rumusan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan.....	31
Tabel 3.11. Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan.....	32
Tabel 3.12. Rumusan Perselisihan Hubungan Industrial.....	32
Tabel 3.13. Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi.....	32



Tabel 3.14. Rumusan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	33
Tabel 3.15. Capaian Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	33
Tabel 3.16. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama.....	34
Tabel 3.17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama	35
Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	37
Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam peren. Strategis.....	39
Tabel 3.20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 3.21. Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	48
Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	49
Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 (sebelumnya)	50



DAFTAR LAMPIRAN

- A. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TAHUN 2025
- B. REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA (AK I) TAHUN 2025
- C. REKAPITULASI PESERTA PELATIHAN TAHUN 2025
- D. REKAPITULASI BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2025
- E. CASCADING/POHON KINERJA TAHUN 2025
- F. SOP EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BAB I

PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan



akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.



- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 14) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mempunyai :

a. Kedudukan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas pokok :

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok:

“Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja”

c. Fungsi :



Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati untuk mencapai Visi dan Misi.

I.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai kartanegara dalam implementasi Renstra periode lalu dan segala potensi keberlanjutannya menjadi dasar penting untuk mengetahui lingkungan strategis organisasi di masa datang. Permasalahan dan dan Isu Trategis tersebut antara lain :

1. Permasalahan

- a. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam bidang peningkatan kompetensi dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan penempatan angkatan kerja antar lintas OPD
- b. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- c. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya pembangunan, pemberdayaan kawasan dan masyarakat eks transmigrasi

2. Isu Strategis

- a. Masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar (*basic needs*);
- b. Dinamika perkembangan perekonomian perdesaan yang masih belum optimal
- c. Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan



- d. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan dan berbasis SDA terbaru
- e. Penataan Ruang

I.5. Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Transmigrasi , membawahkan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.6. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai Kinerja yang Efektif dan Efisien Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 75 orang pegawai dengan perincian 58 orang PNS dan 17 orang PPPK. Data ini tersaji pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai & PPPK Berdasarkan Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI					
		PNS GOLONGAN				PPPK	JUMLAH
		IV	III	II	I		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	S3	-	-	-	-	-	-
2	S2	7	2	-	-	-	9
3	S1	-	23	-	-	9	32
4	DIPLOMA III / IV	-	2	1	-	-	3
5	SLTA	-	1	22	-	8	31
6	SLTP	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PNS dan PPPK		7	28	23	-	17	75

Sumber: Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Distransnaker, September 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	I	-	-	-
2	II	12	11	23
3	III	18	10	28
4	IV	4	3	7
JUMLAH PEGAWAI		34	24	58

Sumber: Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Distransnaker, September 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	I	-	-	-



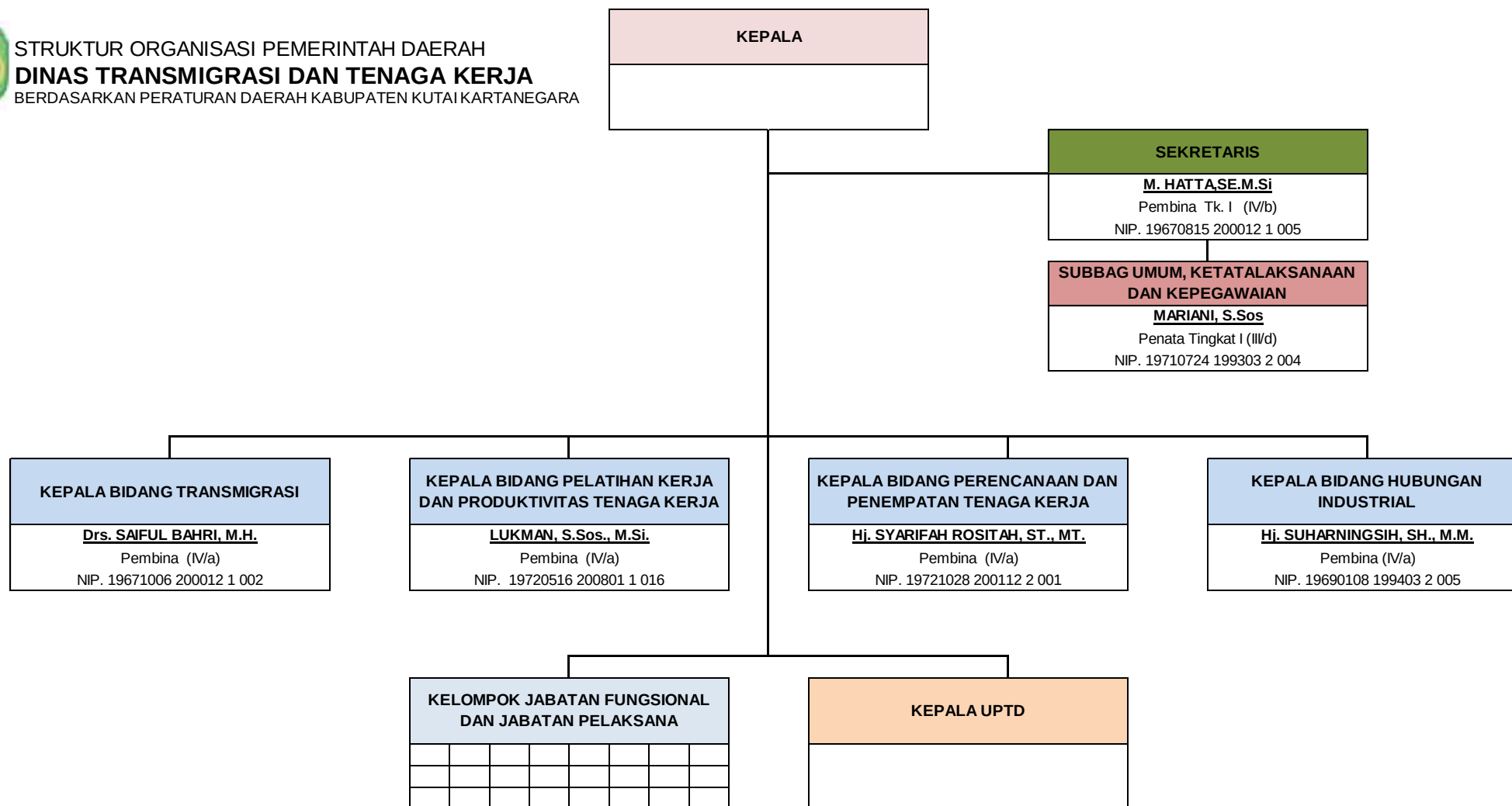
NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
2	II	-	-	-
3	III	4	1	5
4	IV	-	-	-
5	FUNGSIONAL	5	3	8
6	NON ESELON	27	18	45
JUMLAH PEGAWAI		36	22	58

Sumber: Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Distransnaker, September 2025

Adapun Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021-2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja ini disajikan secara rinci pada Metrik Perjanjian Kinerja Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis merupakan program dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan dan pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dengan mempertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

II.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”**. Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus



berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholder* pembangunan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Selanjutnya Visi misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengampu Misi Pertama. Berikut ini keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani (Misi 1)	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya (Misi 2)	Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka PDRB per Kapita



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah.

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja serta menyediakan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar kerja, Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta Meningkatnya partisipasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

b. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagaimana seperti tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
1.	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Persen
			Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen
			Meningkatnya hubungan Industrial yang	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan	Persen



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
			harmonis dan Dinamis	Industrial yang di fasilitasi	
2.	Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Kawasan

II.1.3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan ke dalam 4 (Empat) strategi yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2. Peningkatan wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin
3. Terfasilitasinya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan
4. Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

II.1.4. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai 4 (Empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kutai Kartanegara melalui 13 (Tiga Belas) kebijakan, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja yang bersertifikat terlatih dan berdaya saing sesuai



No.	Strategi	Arah Kebijakan
		kebutuhan pasar kerja di daerah (kukar siap kerja)
2	Peningkatan wirausaha baru , perluasan kesempatan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin	Pelaksanaan Bursa Kerja Online serta Menciptakan wirausaha baru dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat karya,
		Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pengembangan Kemitraan dengan Berbagai Pihak swasta dan Masyarakat
3	Terfasilitasinya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan	Meningkatkan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4	Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Melaksanakan Kajian Rencana Kawasan Transmigrasi
		Merencanakan Penyusunan RKT, RTSKP dan RTSP
		Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan HPL transmigrasi
		Memanfaatkan sisa lahan HPL dan Revitalisasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Mempercepat Proses sertifikasi lahan di kawasan
		Membangun Kawasan Permukiman Transmigrasi
		Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Baru
		Melaksanakan pelatihan SDM Aparatur Desa dalam Kawasan Transmigrasi
		Fasilitasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman



Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan melalui tiga perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal dan perspektif kelembagaan. Adapun definisi masing-masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah.

II.1.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	▪ Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi ▪
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	▪ Pelayanan AntarKerja di Daerah Kabupaten/Kota



Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	▪ Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	▪ Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	▪ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ▪ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ▪ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah ▪ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah ▪ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ▪ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia .yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Kutai Kartanegara merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan.



Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini disajikan rinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	24,34
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan	Persen	12,35
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Difasilitasi	Persen	100
4	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	5
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
6	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
7	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30 (Baik)
8	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah.	Level	3



NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
10	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
11	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
13	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
14	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
15	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
16	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
17	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
18	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97

II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Melaksanakan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 46.397.526.139,- Setelah melalui mekanisme APBD-P Tahun 2025 sebesar Rp. 31.822.462.062,-

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Alokasi Anggaran	Rp. 46.397.526.139,-	Rp. 31.822.462.062,-	(Rp. 14.575.064.077,-)

II.3.1. Alokasi Anggaran Belanja 2025

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja setelah perubahan anggaran belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Belanja Operasi	Rp. 43.428.212.669	Rp. 31.789.492.062	(Rp. 11.638.720.607)
Belanja Modal	Rp. 2.969.313.470	Rp. 32.970.000	(Rp. 2.936.343.470)

III.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran

Alokasi pelaksanaan anggaran per sasaran Tahun 2025, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp. 16.097.282.139	Rp. 12.605.992.012	(Rp. 3.491.290.127)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Rp. 8.003.540.000	Rp. 3.143.833.400	(Rp. 4.859.706.600)
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Rp. 9.510.000.000	Rp. 6.742.215.040	(Rp. 2.767.784.960)
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Rp. 11.386.704.000	Rp. 8.848.883.950	(Rp. 2.537.820.050)
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Rp. 1.400.000.000	Rp. 481.537.660	(Rp. 918.462.340)



III.3.3. Alokasi Anggaran Per Program

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Tahun 2025

Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 16.097.282.139	Rp. 12.605.992.012	(Rp. 3.491.290.127)
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 8.003.540.000	Rp. 3.143.833.400	(Rp. 4.859.706.600)
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 9.060.000.000	Rp. 6.594.047.540	(Rp. 2.465.952.460)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 450.000.000	Rp. 148.167.500	(Rp. 301.832.500)
Program Hubungan Industrial	Rp. 11.386.704.000	Rp. 8.848.883.950	(Rp. 2.537.820.050)
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 650.000.000	Rp. 131.386.100	(Rp. 518.613.900)
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 750.000.000	Rp. 350.151.560	(Rp. 399.848.440)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil bersih dan bertanggung jawab, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara. Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas tugas Pemerintah Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, memlalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

III.1. Capaian Kinerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pengemban amanah masyarakat, melaporkan Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga di buat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2021-2026 maupun RENJA tahun 2025.

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kriteria Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah



Berdasarkan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera dengan sasaran Menurunnya Pengangguran di Masyarakat dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, maka dari itu untuk realisasi capaian dan persentase yang di dapat sebagai berikut ini;

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria Kode
1.	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60	4,11	89,34	Tinggi

Sumber : Kukur Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat diketahui bahwa capaian sararan menurunnya pengangguran di Masyarakat dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Target Pemerintah Daerah yaitu 4,60% sampai pada tahun 2025 realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu sebesar 4,11% atau mencapai 89,34% atau mendekati target yang di harapkan. Capain tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi lintas Lembaga baik pemerintah maupun swasta Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
2. Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor Penghambat tercapainya Target :

1. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai
2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.



Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan realisasi kinerja, Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut;

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	24,34	23,21	95,35	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan	Persen	12,35	11,15	90,28	Tinggi
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	5	3	60	Rendah
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	71,76	98,30	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30	91,45	103	Sangat Tinggi
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah.	Level	3	3	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	Sangat Tinggi
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7	3,25	87,83	Tinggi
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	6,72	96,41	Sangat Tinggi

Adapun Penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi ditargetkan sebesar 24,34. Realisasi capaian menunjukkan angka sebesar 23,21% atau setara dengan 95,35% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja telah berjalan cukup baik, walaupun adanya pengurangan alokasi dana pada pelatihan kompetensi disebabkan efisiensi anggaran sehingga beberapa pelatihan tidak bisa dilaksanakan, sebelum efisiensi target pelatihan sebanyak 589 orang untuk dilatih menjadi sebanyak 196 orang saja. diharapkan kedepannya agar pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran. Efisiensi hendaknya tidak menyentuh program pengembangan kapasitas, karena di sanalah terletak investasi terbesar bagi peningkatan produktivitas daya saing.
- 2) Indikator kinerja persentase pencari kerja yang terdaftar dan berhasil ditempatkan ditargetkan sebesar 12,35%. Realisasi capaian menunjukkan angka sebesar 11,15%, atau setara dengan 90,28% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program penempatan pencari kerja telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Selisih capaian sebesar 1,20 poin persentase menunjukkan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan, sehingga efektivitas penempatan tenaga kerja dapat terus ditingkatkan.
- 3) Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa hubungan industrial bukan sekadar instrumen hukum, melainkan ruang etis untuk membangun kepercayaan, menciptakan keadilan, dan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Keberhasilan fasilitasi perkara bukan hanya diukur dari



penyelesaian konflik, tetapi dari bagaimana proses tersebut mencerminkan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan hubungan kerja

- 4) Berdasarkan hasil dari kegiatan di lapangan indentifikasi potensi kawasan transmigrasi masih kurang optimalnya pengelolaan lokasi transmigrasi, seperti pemanfaatan HPL transmigrasi tidak maksimal, tanah restan tidak dapat dimanfaatkan dan pengembangan kawasan transmigrasi belum terarah. Selain itu ada beberapa masalah yang dihadapi seperti HPL transmigrasi berada di kewenangan pusat, belum ada Kawasan transmigrasi baru yang ditetapkan, koordinasi pusat ke daerah dalam perencanaan kawasan belum optimal dan infrastruktur dasar Kawasan transmigrasi masih terbatas.
- 5) Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 98,30%
Capaian ini tidak lahir dari proses instan. Ia merupakan hasil dari konsistensi dalam menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi, pengukuran kinerja berbasis indikator yang relevan, serta pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan capaian kinerja sebesar 100%
Capaian ini juga memperkuat posisi daerah sebagai pelopor dalam reformasi pelayanan publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika suara publik didengar dan ditindaklanjuti, maka kebijakan yang lahir bukan hanya legal, tetapi juga legitim
- 7) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 103%
Meningkatnya kepuasan masyarakat dari target 88,30 menjadi capaian 91,45 adalah indikator keberhasilan nyata dalam pelayanan publik. Dengan responden 183 orang, 9 pertanyaan, dan 5 layanan yang disurvei, hasil ini mencerminkan komitmen kuat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
- 8) Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya dengan capaian kinerja 100%
Capaian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga pada substansi perbaikan manajerial yang berkelanjutan. Dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK, Perangkat Daerah telah memperkuat fondasi keuangan publik yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan membuka ruang bagi inovasi dalam pengelolaan anggaran



- 9) Target maturitas SPIP level 3 dengan capaian 100 persen artinya seluruh persyaratan “terdefinisi” telah dipenuhi secara konsisten, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan manajemen risiko serta pengendalian korupsi, sesuai pedoman BPKP tentang SPIP Terintegrasi.
- 10) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan capaian nilai 58,59 mencerminkan adanya peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam mendukung agenda Pekan Inovasi Daerah. Angka tersebut berada pada kategori cukup baik, menandakan bahwa partisipasi sudah meluas ke berbagai OPD, meskipun masih ada ruang untuk penguatan kualitas dan konsistensi
- 11) Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor dengan capaian kinerja sebesar 100%
Capaian ini mencerminkan bahwa setiap suara warga baik berupa keluhan, aspirasi, maupun saran telah ditanggapi secara cepat, tepat, dan tuntas. Tidak ada laporan yang diabaikan, tidak ada aduan yang tertunda. Setiap pengaduan diproses melalui mekanisme yang terstandarisasi, didokumentasikan dengan baik, dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sesuai dengan jenis layanan yang dilaporkan
- 12) Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia dengan capaian sebesar 100%
Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh data prioritas dari perangkat daerah telah berhasil dikompilasi, divalidasi, dan diunggah sesuai dengan standar metadata dan kode referensi nasional. Proses ini tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga memperkuat posisi daerah sebagai penyedia data yang kredibel dan siap digunakan dalam perumusan kebijakan
- 13) Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dengan capaian kinerja sebesar 100%
Capaian pada pelaksanaan GEMA di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak terbatas pada rutinitas membaca Al-Qur'an, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, penguatan nilai integritas, dan pembiasaan etos kerja Islami.
- 14) Nilai LPPD dengan capaian kinerja sebesar 87,83%
Capaian tersebut mencerminkan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah, serta menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal, efektivitas pengelolaan anggaran, dan pencapaian indikator kinerja utama.
- 15) Berdasarkan Surat KemenPANRB yang menetapkan capaian 71,51 atas target 65 merupakan bukti nyata bahwa Pemkab Kutai Kartanegara berhasil melampaui ekspektasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat, sinergi perangkat daerah, serta keberhasilan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan public



- 16) Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100%
Capaian ini memperkuat dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek penguatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelayanan publik. Ketika seluruh indikator kunci tercapai, maka pemerintah daerah telah menunjukkan bahwa perencanaan bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata
- 17) Presentase Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja sebesar 96,14%
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi angka kemiskinan Kukar pada tahun berjalan tercatat sebesar 6,72%. Meski secara nominal angka tersebut hampir mencapai dari target, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa target penurunan angka kemiskinan telah tercapai sebesar 96,14% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD atau dokumen perencanaan strategis daerah

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Terwujudnya pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

I. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Rumusan dari Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Hasil Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100$



Tabel 3.4
Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	73	71,76	98,30

Hasil nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten adalah 71,76 (Tujuh Puluh Satu Koma Tujuh Enam) dengan Kriteria Penilaian “Sedang” Dari target yang diinginkan sebesar 73 maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mendekati target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 98,30%.

Berikut perbandingan dan capaian pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dinas transmigrasi dan tenaga kerja tahun 2025 dan capaian akuntabilitas kinerja pertahun terhadap target akhir Renstra dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Indikator	Capaian				Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025
		2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	Persen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	69,56	79,29	81,80	70,92	73	71,76	98,30	71,50	267

Jika dilihat pada tabel Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari Tahun 2021 s/d 2024 mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya. Pada capaian kinerja Tahun 2025 yaitu 71,76 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan masuk kedalam kriteria penilaian “sangat tinggi” dengan persentase capaian sebesar 98,30%.



II. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing

Sasaran meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah pencari Kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan dinyatakan dengan persen.

Tabel 3.6
Rumusan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$

Tabel 3.7
Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	96,25	95,89	99,62

Target Capaian Indikator Tingkat Kesempatan Kerja dengan cara hitung Jumlah penduduk yang bekerja di bagi jumlah Angkatan kerja di kali seratus. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diperoleh Jumlah Penduduk yang Bekerja sebesar 376.150 Orang untuk Jumlah Angkatan Kerja ditahun 2025 adalah 392.275 atau 99,62%, Dimana Tingkat kesempatan kerja telah mencapai target yang diharapkan.

Tabel 3.8.
Rumusan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$



Tabel 3.9
Capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	24,34	23,21	95,35

Berdasarkan hasil capaian persentase tenaga kerja yang dilatih tahun 2025 yang dihitung dari jumlah pencari kerja yang dilatih sampai dengan Tahun 2025 di bagi jumlah pencari kerja yang terdaftar di kali seratus, dengan data jumlah pencari kerja yang dilatih sampai saat ini sebesar 2.566 Orang dan Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 11.055 Orang sehingga dapat pendapat diperoleh realisasi target sebesar 23,21% dengan capaian sebesar 95,35%, dengan demikian target tersebut telah berjalan cukup baiki walaupun adanya pengurangan alokasi dana disebabkan efisiensi anggaran yang terjadi.

III. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru

Sasaran Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai informasi kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan baru dengan indikator persentase pencari kerja yang terdaftar ditempatkan adalah penduduk kutai kartanegara yang telah terdaftar dan tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai pencari kerja yang siap ditempatkan di sektor swasta.

Tabel 3.10.
Rumusan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencaker yg ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100$



Tabel 3.11.
Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	12,35	11,15	90,28

Berdasarkan hasil Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan Tahun 2025 dapat di peroleh capaian sebesar 11,15% dengan persentase capaian 90,28% dengan demikian target Indikator persentase pencari kerja yang terdaftar ditempatkan telah berjalan cukup baik.

IV. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis

Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pemerintah dengan perusahaan, apabila timbul perselisihan antara pihak perusahaan dengan pekerja/buruh maka diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan mediasi. Untuk itu rumusan dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12.
Rumusan Perselisihan Hubungan Industrial

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan difasilitasi}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100$

Tabel 3.13.
Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	100	100	100



Berdasarkan hasil Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi Tahun 2025 dapat di peroleh capaian sebesar 100% dengan persentase 100% dengan demikian target Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi telah mencapai target yang diharapkan.

V. Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru

Sasaran Meningkatnya perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi baru adalah sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk kemajuan dikawasan Transmigrasi diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 3.14.

Rumusan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan}} \times 100$

Tabel 3.15.

Capaian Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Jumlah kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	5	3	60

Berdasarkan Tabel diatas capaian Jumlah Kawasan desa/kimtrans yang ditata/dibangun dengan realisasi 3 Dokumen antara lain : Laporan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Kota Bangun, Dokumen Rencana, Kawasan Transmigrasi Kecamatan Tabang, Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Tenggarong Seberang dan Kecamatan Sebulu.

Penyempurnaan Rencana Kawasan Transmigrasi Kecamatan Kota Bangun karena kewenangan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi ada di Kementerian Desa,



Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta adanya perubahan regulasi yang harus di penuhi terkait penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi harus ada identifikasi Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten/Kota maka Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi masih dalam tahap penetapan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

III.3. Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.16
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

No	IKU	Formulasi Penghitungan	Satuan	Angka Perhitungan	Hasil
1.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dibagi Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dikali 100	Persen	$(2.566 / 11.055 \times 100)$	23.21%
2.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dikali 100	Persen	$(384 / 3.444 \times 100)$	11,15%
3.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan yang di Fasilitasi dibagi Jumlah Kasus yang Terdaftar dikali 100	Persen	$(103 \text{ Kasus} / 103 \text{ Terdaftar} \times 100)$	100%
4.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dibagi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Rencanakan dikali 100	Dokumen	$(5 \text{ Dokumen} / 3 \text{ Dokumen} \times 100)$	60%



Dari tabel tersebut terlihat bahwa Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	24,34	23,21	95,35	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	12,35	11,15	90,28	Tinggi
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Dokumen	5	3	60	Rendah

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi

Target Kinerja “Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi” tahun 2025 sebesar 24,34% dari pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan realisasinya sebesar



23,21% dengan capaian kinerja sebesar 95,35% Berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi. Target kinerja **“Melebihi Target”**. Dalam mencapai target tidak lepas dari beberapa faktor yaitu kersama dengan beberapa Perusahaan yang turut serta dalam pengembangan kompetensi bagi pencari kerja sehingga dapat menambah capaian kinerja , kerjasama dengan Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, penggunaan alat bagi peserta pelatihan, pengetahuan atau penguasaan materi bagi instruktur pelatih, dan pendanaan yang cukup untuk menunjang keberhasilan, walaupun adanya pengurangan alokasi dana pada pelatihan kompetensi disebabkan efisiensi anggaran sehingga beberapan pelatihan tidak bisa dilaksanakan, sebelum efisiensi target pelatihan sebanyak 589 orang untuk dilatih menjadi sebanyak 196 orang saja. diharapkan kedepannya agar pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran. Efisiensi hendaknya tidak menyentuh program pengembangan kapasitas, karena di sanalah terletak investasi terbesar bagi peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kompeten adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan

2) Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan

Target Kinerja “Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar di Tempatkan” tahun 2025 sebesar 12,34% dari pencari kerja yang terdaftar dan realisasinya 11,15% dengan capaian kinerja sebesar 90,28%. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar ditempatkan. Target kinerja **“Tercapai”**. Dalam Pencapaian target tidak lepas dari beberapa faktor antara lain keterbatasan kualitas data dan kompetensi pencari kerja, kapasitas layanan penempatan yang belum optimal, serta kondisi eksternal seperti rendahnya permintaan tenaga kerja, keterbatasan investasi, dan adanya ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan efektivitas program penempatan tenaga kerja di masa mendatang.

3) Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial

Target Kinerja “Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial” tahun 2025 sebesar 100% dari kasus perselisihan yang terdaftar dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan jumlah kasus Perselisihan Hubungan



Industrial yang terselesaikan. Target kinerja **“Tercapai”**. Dengan kata lain Program/Kegiatan tersebut telah mencapai target yang ditentukan. Penunjang keberhasilan dalam mencapai target tidak lepas dari mentaati aturan ketenagakerjaan yang menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui perundingan musyawarah untuk mufakat. Prosedur yang disediakan melalui mediasi atau konsolidasi atau arbitrase.

4) Persentase Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di Bangun dan di Kembangkan

Target Kinerja sampai Tahun 2025 “Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan” sebanyak 5 Dokumen dan realisasinya 3 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 60%. Berdasarkan kawasan yang direncanakan target kinerja sudah berjalan cukup baik. Kendala utama yang dihadapi adalah pengelolaan kawasan transmigrasi, terutama terkait pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan daerah kesulitan dalam memanfaatkan potensi lahan untuk mendukung program transmigrasi dan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, tanah restan (tanah R) yang tidak dapat dimanfaatkan, serta belum adanya penetapan kawasan transmigrasi baru, menjadi hambatan lain yang memengaruhi perkembangan program transmigrasi. Akar masalah ini adalah kurangnya koordinasi dan regulasi yang tidak mendukung desentralisasi pengelolaan kawasan transmigrasi.

III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan realisasi kinerja tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.18.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	71,50	70,92	99,18%	73	71,76	98,30	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persen	20,50	22,77	111%	24,34	23,21	95,35	
Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor Formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	10,37	18,86	181%	12,35	11,15	90,28	
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan	Persentase Fasilitas Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	100%	100	100	100	
Meningkatnya Cakupan program transmigrasi yang dilaksanakan	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan Transmigrasi	Dokumen	4	4	100%	5	3	60	

III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.19.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	112,15	84,26	75,13%
Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	51,85	51,78	99,86%
Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	500	400	80%
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	5	4	90%
Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	366,4	303,77	82,90%

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$100 - 5 = (6)$	(7)
Meningkatnya kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	95,35%	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	92,58%	2,77%	Efisiensi



Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	100-5= (6)	(7)
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	99,86%	Program Penempatan Tenaga Kerja	69,25%	30,61%	Efisiensi

- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti maksud yang diatas, hal ini disebabkan jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensinya melebihi target yang ditentukan sehingga penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan dan melebihi target yang diharapkan.
- b) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti maksud yang diatas, hal ini disebabkan para pencari kerja telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga lebih mudah ditempatkan di sektor swasta dan dapat bersaing dengan pencari dari daerah lainnya. Oleh sebab itu penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan dan melebihi target yang diharapkan.



III.3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja terangkum dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
1	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	- Keterampilan dan Pendidikan yang Relevan, seperti tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan minimal SMA/SMK sangat dibutuhkan dan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing - Realokasi SDM ke Sektor Produktif, yaitu Pemerintah mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah (seperti jasa informal dan pertanian tradisional) ke sektor strategis yang lebih produktif.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Kesenjangan antara pelatihan dan kebutuhan industri, meski pelatihan seperti mekanik, welding, dan desain grafis sudah berjalan, belum semua disesuaikan dengan permintaan spesifik industri lokal (misalnya sektor migas, IKN, atau agribisnis). - Minimnya akses bagi kelompok rentan, meskipun DTKS diprioritaskan, masih ada warga yang belum terjangkau karena keterbatasan informasi, lokasi, atau fasilitas	- Kurikulum adaptif berbasis industri lokal seperti melibatkan perusahaan di Kukar dan IKN dalam penyusunan kurikulum agar pelatihan langsung menjawab kebutuhan riil - Digitalisasi pendaftaran dan pelatihan seperti menggunakan platform online untuk pendaftaran, pelatihan daring, dan pemantauan alumni. Ini juga memperluas jangkauan ke daerah terpencil



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
		- Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, yaitu adaptasi terhadap teknologi industri 4.0 dan digitalisasi proses kerja meningkatkan efisiensi dan output		- Kurangnya sistem pemantauan pasca-pelatihan yang belum ada sistem tracking yang kuat untuk melihat apakah peserta pelatihan benar-benar terserap ke dunia kerja atau meningkatkan produktivitasnya - Ketergantungan pada pelatihan teknis jangka pendek pada pelatihan cenderung bersifat teknis dan jangka pendek, belum banyak yang mengarah pada soft skills, kewirausahaan, atau pelatihan berkelanjutan - Antrean dan kuota terbatas: Antusiasme tinggi menyebabkan pendaftaran sering membludak, namun kuota terbatas membuat banyak calon peserta tertunda	- Program lanjutan pasca-pelatihan: Membentuk unit pendampingan kerja atau inkubasi wirausaha bagi lulusan pelatihan agar tidak hanya selesai di ruang kelas - Integrasi pelatihan soft skills dan etika kerja: Menambahkan modul seperti komunikasi, kepemimpinan, dan nilai-nilai Pancasila agar peserta siap secara mental dan sosial - Perluasan kemitraan dan CSR: Mengandeng lebih banyak perusahaan melalui skema CSR untuk mendukung pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	- Kompetensi dan keterampilan kerja: Tenaga kerja lokal sering kali kalah bersaing dengan tenaga kerja migran dalam posisi manajerial karena keterampilan teknis dan soft skills yang belum optimal - Motivasi dan mobilitas kerja: Banyak tenaga kerja enggan ditempatkan di lokasi kerja yang jauh atau menantang, terutama jika fasilitas pendukung minim - Kesesuaian latar belakang pendidikan: Penempatan kerja sering terhambat karena mismatch antara pendidikan formal dan kebutuhan industri lokal - Ketersediaan informasi pasar kerja: Belum ada sistem digital terpadu yang menghubungkan pencari kerja dengan lowongan kerja secara real-time dan transparan	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Mismatch antara kompetensi dan kebutuhan pasar kerja yang banyak pencari kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal seperti migas, agribisnis, dan sektor IKN - Minimnya informasi pasar kerja yang terintegrasi: Belum tersedia sistem digital terpadu yang menghubungkan pencari kerja dengan lowongan kerja secara real-time - Kurangnya sinergi antar instansi seperti penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya melibatkan lintas sektor seperti koperasi, UKM, dan PU, padahal mereka punya peran strategis - Rendahnya mobilitas kerja antar wilayah sebagai contoh tenaga kerja lokal cenderung enggan berpindah ke lokasi kerja yang jauh karena faktor biaya, budaya, atau	- Integrasi RTKD dengan sistem informasi pasar kerja digital: Mengembangkan platform online berbasis data RTKD untuk menghubungkan pencari kerja dengan lowongan kerja secara dinamis dan transparan - Kemitraan aktif dengan dunia usaha dan IKN: Melibatkan sektor swasta dan proyek IKN dalam penyerapan tenaga kerja lokal melalui MoU dan skema prioritas penempatan - Pemetaan kompetensi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri: Menggunakan data RTKD dan Sakernas untuk menyusun pelatihan kerja yang langsung menjawab kebutuhan pasar kerja Kukar - Pendampingan mobilitas kerja dan insentif relokasi: Memberikan subsidi transportasi atau akomodasi bagi tenaga kerja yang bersedia ditempatkan di lokasi kerja strategis



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				minimnya fasilitas pendukung - Kurangnya pemantauan pasca penempatan yang tidak ada sistem tracking yang memantau keberhasilan penempatan dan keberlanjutan kerja tenaga kerja yang telah ditempatkan	- Monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja: Membentuk unit khusus untuk memantau keberhasilan penempatan dan menyusun laporan dampak sosial-ekonomi
3	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	- Tingkat literasi ketenagakerjaan: Pekerja yang memahami hak dan kewajiban cenderung lebih aktif dalam dialog sosial dan pelaporan pelanggaran - Komitmen manajemen terhadap prinsip hubungan industrial: Perusahaan yang konsisten menerapkan prinsip K3, kontrak kerja yang adil, dan kompensasi layak cenderung memiliki tingkat kepatuhan tinggi - Budaya kerja inklusif dan transparan: Lingkungan kerja yang terbuka terhadap	Program Hubungan Industrial	- Minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban kerja: Banyak pekerja dan pengusaha belum sepenuhnya memahami UU Ketenagakerjaan dan prinsip hubungan industrial yang sehat - Perselisihan hubungan kerja yang belum tertangani optimal: Mekanisme penyelesaian konflik masih bergantung pada mediasi manual dan belum terintegrasi secara digital - Keterbatasan kapasitas SDM mediator dan pengawas: Jumlah dan	- Peningkatan literasi ketenagakerjaan: Melaksanakan sosialisasi reguler dan pelatihan tentang hak-hak pekerja, kontrak kerja, dan penyelesaian perselisihan - Digitalisasi layanan hubungan industrial: Membangun sistem online untuk pelaporan perselisihan, konsultasi hukum, dan mediasi daring - Penguatan kapasitas SDM pengawas dan mediator: Melakukan pelatihan



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
		aspirasi pekerja memperkuat hubungan industrial yang harmonis - Sosialisasi dan pelatihan dialog sosial: Pelatihan rutin tentang dialog sosial dan hak-hak pekerja meningkatkan partisipasi dan kepatuhan norma ketenagakerjaan - Implementasi Konvensi ILO dan UU Ketenagakerjaan: Efektivitas perlindungan hak pekerja sangat dipengaruhi oleh penerapan regulasi nasional dan internasional secara konsisten		kompetensi petugas hubungan industrial belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kukar - Kurangnya forum komunikasi tripartit yang aktif: Dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha belum berjalan rutin dan strategis - Ketimpangan perlindungan tenaga kerja sektor informal: Pekerja sektor informal seperti buruh harian lepas atau UMKM belum mendapat perlindungan hubungan kerja yang memadai	berkelanjutan dan rekrutmen tenaga mediator yang kompeten di tiap kecamatan - Revitalisasi forum tripartit daerah: Menjadwalkan pertemuan rutin antara pemerintah, APINDO, dan serikat pekerja untuk menyusun kebijakan bersama - Perluasan perlindungan sektor informal: Merancang skema hubungan kerja fleksibel yang tetap menjamin hak dasar pekerja informal, seperti jaminan sosial dan kontrak kerja sederhana
4	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	- Kondisi geografis wilayah transmigrasi: Wilayah seperti Tabang memiliki tantangan aksesibilitas tinggi, sehingga memengaruhi distribusi logistik dan pembangunan fasilitas dasar	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	- Status lahan belum clear and clean: Banyak lahan yang diusulkan belum memiliki kepastian hukum, berpotensi tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung atau HPL lain	- Verifikasi dan legalisasi lahan secara menyeluruh: Memastikan lahan yang diusulkan bebas sengketa, sesuai RTRW, dan memiliki SK Bupati sebagai dasar hukum



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
		- Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU): Keberadaan jalan, listrik, air bersih, sekolah, dan fasilitas kesehatan sangat menentukan kenyamanan dan keberlanjutan pemukiman - Potensi ekonomi wilayah transmigrasi: Wilayah yang memiliki potensi agribisnis, perikanan, atau pariwisata lebih cepat berkembang dan menarik minat transmigran		- Koordinasi antar OPD belum optimal: Perencanaan kawasan transmigrasi memerlukan sinergi antara Bappeda, DPMD, Disperkim, kecamatan, dan desa, namun koordinasi masih parsial - Minimnya integrasi dengan RTRW dan RPJMD: Beberapa lokasi belum sepenuhnya masuk dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga sulit untuk ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi resmi - Keterbatasan infrastruktur dasar: Wilayah yang direncanakan masih minim akses jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas sosial, sehingga tidak siap menerima penduduk baru	- Penyusunan RKT berbasis data dan partisipatif: melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, dan OPD teknis dalam penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi agar responsif dan inklusif - Integrasi penuh dengan RPJMD dan RTRW Kukar: memastikan kawasan transmigrasi masuk dalam dokumen perencanaan daerah agar mendapat prioritas anggaran dan dukungan lintas sektor - Pembangunan infrastruktur dasar secara bertahap: Fokus pada penyediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) seperti jalan, air, listrik, dan fasilitas pendidikan/kesehatan sebelum penempatan



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				- Risiko sosial dan budaya: Perpindahan penduduk dari luar daerah berpotensi menimbulkan gesekan sosial jika tidak disiapkan dengan pendekatan budaya dan partisipatif	- Pendekatan sosial budaya dan komunikasi publik: Melakukan sosialisasi lintas daerah, pelatihan budaya lokal, dan pembentukan forum warga untuk mencegah konflik sosial



Tabel 3.21.
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	24,34	23,21	95,35	Berhasil
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	12,35	11,15	90,28	Berhasil
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	100	100	100	Berhasil
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Perencanaan Kawasan Tranmigrasi	5	3	60	Berhasil
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	73	71,76	98,30	Berhasil



III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 78,81% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.143.833.400	2.910.553.348	92,58	233.280.052
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	148.167.500	123.932.630	83,64	24.234.870
		Program Penempatan Tenaga Kerja	6.594.047.540	4.566.360.044	69,25	2.027.687.496
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	8.848.883.950	6.669.268.143	75,37	2.179.615.807
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan dibangun dan dikembangkan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	131.386.100	68.939.625	52,47	62.446.475
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	350.151.560	209.811.950	59,92	140.339.610
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.605.992.012	10.530.350.513	79,13	2.075.641.499
Total (Rp)			31.822.462.062	25.079.216.253	78,81	6.743.245.809



Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar 81,36%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.23.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024 (Sebelumnya)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	16.052.340.000	11.567.169.818	72,05	4.485.170.182
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausaha baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	100.000.000	94.394.740	94,39	5.605.260
		Program Penempatan Tenaga Kerja	8.672.399.000	7.715.264.852	88,96	957.134.148
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	11.271.341.700	9.912.045.830	87,94	1.359.295.870
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1.100.000.000	664.909.600	60,44	435.090.400
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	300.000.000	284.095.500	94,69	15.904.500
Meningkatnya Transparansi dan	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas	Program Penunjang Urusan	15.094.099.333	12.552.570.451	83,16	2.541.528.882



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pemerintah Daerah				
Total (Rp)			52.590.180.033	42.790.450.791	81,36	9.799.729.242

Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 78,81%. Dibandingkan dengan tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 81,36%. atau mengalami penurunan sebesar 2,55% dari tahun sebelumnya.



BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 melebihi target yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing sebesar 95,35%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 2) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru sebesar 90,28%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 3) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis sebesar 100%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 4) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru sebesar 60%
- 5) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar 98,30%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.

Adapun penyerapan anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebesar Rp. 31.822.462.062,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.079.216.253,- atau 78,81%. oleh sebab itu, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.743.245.809,-. Efisiensi ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

IV.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Kedepan diperlukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker yang lebih intens, akan tetapi program tersebut harus sejalan dengan anggaran yang cukup besar yang tidak hanya mengandalkan APBD melainkan dari pihak swasta, DAK maupun APBN. Mengingat semakin banyak pencaker yang mengikuti pelatihan maka



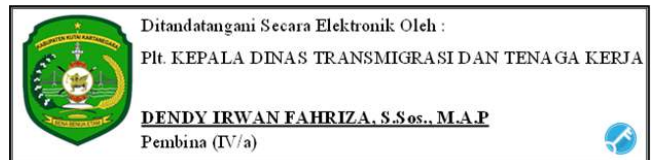
semakin banyak pula kesempatan untuk bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. Program ini tidak hanya berasal dari Dinas yang membidangi pembangunan ekonomi sebagai pengguna tenaga kerja, serta perlunya suatu kerjasama dari berbagai pihak.

- 2) Adanya Data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan secara akurat, yang dilakukan oleh Perusahaan, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang terdaftar / Legal. Selain itu diharapkan kedepannya jumlah antara pencari kerja sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
- 3) Tersedianya info lowongan kerja Kabupaten yang diinput atau dilaporkan secara manual oleh baik OPD yang menciptakan pasar kerja seperti Disperindagkop, Pertanian dan Hortikultura, Perikanan dan kelautan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya maupun Perusahaan yang ada disekitar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara data ini akan memudahkan dalam rangka pemetaan kebutuhan kompetensi yang harus diberikan kepada Pencari Kerja agar dapat diterima oleh pasar kerja tersedia.
- 4) Memberikan pemahaman tentang undang-undang ketenagakerjaan agar terdapat pemahaman yang sama, baik di perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Selain itu juga diperlukan data jumlah kasus yang diselesaikan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran dan data jumlah kasus yang dicatatkan diperoleh dari bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, dan Data jumlah pekerja/buruh dan jumlahpekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek. Selain itu diharapkan kedepannya ada penambahan sumber daya atau personil (mediator) saat ini yang hanya berjumlah 3 orang.
- 5) Untuk mempercepat kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pembangunan dan perkembangan kawasan Transmigrasi perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunannya tidak bisa dilakukan satu pihak, oleh sebab itu unsur pemerintah , masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga perlunya anggaran dalam mengidentifikasi potensi kawasan transmigrasi diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 27 Februari 2025





LAMPIRAN



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.	 10:13 04/10/2025 Sabtu Rumah Dinas SKB SPNF, Jl. Keumari No.2, Bukit Raya, Kec. Tenggatong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512	Pelaksanaan Pelatihan Dasar Satpam Gada Pratama
2.	 12:57 27/11/2025 Kamis Los Jaran Ulu, Kec. Los Jaran, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75251	Pelaksanaan Pelatihan Operator Dump Truck
3.	 13:23 25/08/2025 Rabu Bungai Keledang, Kec. Sentaraja Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Pelaksanaan Pelatihan Welder



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
7		Pelaksanaan Pembekalan Pertukangan
8		Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan
9		Pelaksanaan Pembekalan Public Speaking



No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
10		Pelaksanaan Job Fair 2025
11		Sosialisasi dan FGD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA TAHUN 2025

No	Pendidikan	Sisa Tahun Lalu		Yang Terdaftar		Penempatan		Penghapusan		Sisa Akhir	
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W
1	SD	522	18	231	11	35	14	127	4	591	11
2	SMP	411	154	174	20	25	3	122	13	438	158
3	SMU	5317	1950	2097	426	235	68	1735	243	5444	2065
4	DI / DII	1	4	0	1	0	0	1	0	0	5
5	DIII	170	252	66	47	0	0	25	7	211	292
6	SI	817	786	166	202	1	3	79	57	903	928
7	S2	4	2	2	1	0	0	0	0	6	3
	Jumlah	7242	3166	2736	708	296	88	2089	324	7593	3462
	Jumlah (L+W)	10408		3444		384		2413		11055	

Mengetahui,
Kepala Bidang
Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja


Syarifah Rositah, ST, MT
NIP. 19721028 200112 2 001

Tenggarong, Desember 2025

Pengelola Data


Herwin Setiawan, S.Sos
NIP. 19780505 200801 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jalan APT. Pranoto No. 85 RT.III Kel.Sukarama Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053
Website : distransnaker.kukarkab.go.id E-mail : distransnaker@kukarkab.go.id Tenggarong Kode Pos 75515

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN TAHUN 2025

NO	KEJURUAN	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	PEDIDIKAN TERAKHIR	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	NO HP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	BUSMAN SAMKAR	6402172101010002	Laki-Laki	SMA	Sebuntal 2001-01-21	Kampung Bagang Rt 06	Semangko	Marang Kayu	085787836495	P3KE
2	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	TARMIJI	6402112511950002	Laki-Laki	SMA	Teratak 1995-04-25	Teratak Rt. 04	Teratak	Muara Kaman	081545736249	P3KE
3	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD IQBAL	6402072412960001	Laki-Laki	SMA	Sebulu 1996-12-24	Jalan Abdul Riso Rt 12 Sebulu Ulu	Sebulu Ulu	Sebulu	089531917183	P3KE
4	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	HABIB AL MURTI HAFIZUDIN	6402161707050002	Laki-Laki	SMA	Samarinda 2005-07-17	Separi 1	Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang	085392343927	P3KE
5	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MOH.ARIEL	*6402180803050001	Laki-Laki	SMA	Lebak Cilong 2005-03-08	Jl.Kartanegara Rt.009	Lebak Cilong	Muara Wis	082298156270	P3KE
6	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD ANANTA PRADITYA	6402112903020001	Laki-Laki	SMA	Tenggarong 2002-03-29	Muara Kaman Ulu Rt. 06	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	0895385979896	P3KE
7	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	PONCO ANDRIYANTO	*6402162907000001	Laki-Laki	SMA	Tenggarong 2001-07-29	Jln Sultan Hasanuddin	Loa Pari	Tenggarong Seberang	082248118583	P3KE
8	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	CHANDRA FEBBY HERMAWAN	*6402161702970001	Laki-Laki	SMA	Loa Pari 1997-02-17	Loa Pari Rt. 4 No. 32	Loa Pari	Tenggarong Seberang	082271045688	P3KE
9	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ACHMAD FIRDAUS	*6402133107040002	Laki-Laki	SMA	Samboja 2004-07-31	Jalan Anggrek	Bukit Raya	Samboja	082152809765	P3KE
10	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RICHO FEBRIAN	*6402062902040001	Laki-Laki	SMA	Tenggarong 2004-02-29	Jln Loa Ipuh No 29 Rt 09	Loa Ipuh	Tenggarong	0895412824483	UMUM
11	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	TRI MURIYA NOER	*6402060403040007	Laki-Laki	SMA	Tenggarong 2004-03-04	Jl.Selendrengr	Loa Ipuh	Tenggarong	085158164833	UMUM
12	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ROHMAH MARUF	*6402076711010003	Perempuan	SMA	Sebulu 2001-11-27	Sebulu	Sebulu Ulu	Sebulu	082252451049	UMUM
13	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	NUR CAHAYA	*6402064305930002	Perempuan	SMA	Tenggarong 1993-05-03	Jl. Perumahan Rangga Yuda Rt. 12	Mangkurawang	Tenggarong	081237907097	UMUM
14	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ZULKIFLI AK	7371111612960007	Laki-Laki	SMA	Mamuju,16-12-1996	Jl.Palacari Rt 1	Batu Batu	Muara Badak	081997557960	UMUM
15	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SULTANG	6402051502051002	Laki-Laki	SMA	Muara Badak,15-02-2005	Jl.Bina Cipta Rt.15	Muara Badak Ulu	Muara Badak	081351957918	UMUM
16	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ANDI ALIF MARUF PASAYURI	6402050106010001	Laki-laki	SMA	Muara Badak, Kaltim,01-06-2001	Jln Rahmat Badak 1	Gas Alam Badak I	Muara Badak	081528453463	UMUM
17	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	M.IKHSAN.ABUHARY	6402050604030003	Laki-laki	SMA	Muara Badak, 06 April 2003	Jl. Cedndrawasih Gang Berkah Rt 11 No 09	Badak Baru	Muara Badak	085656630676	UMUM
18	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	IVAN MS	6402051911970005	Laki-laki	SMA	Muara Badak, 19 November 1997	Jl. S. Hasanuddin Rt. 026	Badak Baru	Muara Badak	085161011197	UMUM
19	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	JUANAEDI HADI PRATAMA	6402052306000001	Laki-laki	SMA	Muara Badak,23-06-2000	Jl.S.Hasanudin Rt 5	Badak Baru	Muara Badak	082251655065	UMUM
20	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD DHANI ARIYANDA	6402051904980002	Laki-laki	SMA	Muara Badak, 19 April 1998	Jl. Pasar Inpres Rt. 06	Muara Badak Ulu	Muara Badak	085753428625	UMUM
21	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ALFIN SUGARA	6402050806970003	Laki-laki	SMA	Muara Badak,08-06-1998	Jln Bina Cipta Gg Kramat Rt 15	Muara Badak Ulu	Muara Badak	085845302845	UMUM
22	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	DWI YANTO RAMADHAN	6402052910030003	Laki-laki	SMA	Muara Badak 29 - 10 - 2003	Jl. Cokroaminoto Rt 24	Gas Alam Badak I	Muara Badak	0822 4620 5647	UMUM
23	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	AWALUDDIN	6402050601020001	Laki-laki	SMA	Muara Badak, 06 Januari 2002	Jl. Pasar Inpres Rt. 06	Muara Badak Ulu	Muara Badak	085246450891	UMUM
24	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RESAL RAHMAN	6402054502980004	Laki-laki	SMA	Muara Badak, 05-02-1998	Jln. Plin	Muara Badak Ulu	Muara Badak	081549164069	UMUM
25	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ADINDA DWI FRAMESTI	6402054902050001	Perempuan	SMA	Tenggarong, 09-02-2005	Jl. Perintis Kp Jawa Rt 23 Gg2 No 42	Badak Baru	Muara Badak	085822772375	UMUM
26	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	EKA LIA AMANDA	6402056404040006	Perempuan	SMA	Muara Badak , 24-04-2004	Jln.Perintis Kp.Jawa Rt 23 Gang 1 Asoka	Badak Baru	Muara Badak	082352135512	UMUM
27	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SINARDI	6402050112950001	Laki-laki	SMA	Sulsel 01 Des 1995	Jl. Dermaga Baru	Muara Badak Ilir	Muara Badak	081352079634	UMUM
28	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD AKMAL	6402051305040002	Laki-laki	SMA	Muara Badak, 13 Mei 2004	Jln.Sultan Hasanuddin Rt. 08	Badak Baru	Muara Badak	081549165237	UMUM
29	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ALPIANSA	6402050806030001	Laki-laki	SMA	Muara Badak,08-06-2003	Jl.Bina Cipta Rt.15	Muara Badak Ulu	Muara Badak	081549150128	UMUM
30	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ARIE FRIADI	6402051210020002	Laki-Laki	SMA	Muara Badak,12-10-2002	Jl.Pasar Inpres Rt 6	Muara Badak Ulu	Muara Badak	085787477963	UMUM
31	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RAIHAN MUHAMMAD	7306080902040003	Laki-Laki	SMA	Palu,9-02-2004	Jl.Manunggal Rt 22	Tanjung Limau	Muara Badak	082264016668	UMUM
32	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	HABIDIR ALI	*6402062711970001	Laki-Laki	SMK	Tenggarong 1997-11-27	Jalan.Gunung Belah, Gang.Kita Jua, No.87 Rt.73, Loa Ipuh, Tengg	Loa Ipuh	Tenggarong	085787738343	UMUM
33	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	IQBAL	*6402111908000001	Laki-Laki	SMA	Benua Puhun 2000-08-19	Benua Puhun	Benua Puhun	Muara Kaman	082251890915	UMUM
34	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MOHD. DECKI SAPUTRA	6402063108950001	Laki-Laki	SMA	Tenggarong, 31-08-1995	Jl.Kh.Akhmad Muksin Rt 1	Timbau	Tenggarong Seberang	0895321495570	UMUM
35	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	DIMAS BAYU AJI	*6402162810050003	Laki-Laki	SMK	Teluk Dalam 2005-10-28	Jln.Ap. Mangkunegara	Teluk Dalam	Tenggarong Seberang	082357306706	UMUM
36	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD NUR	*6402062806990002	Laki-Laki	SMA	Tenggarong 1999-06-28	Jalan Beringin 2 Gunung Pegat No 16 C Rt 35	Melayu	Tenggarong	085251826060	UMUM
37	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	TANIA AULIA	*6402075908000003	Perempuan	SMA	Sebulu 2000-08-19	Jln. Sunatanata Rt 008	Sebulu Ulu	Sebulu	085921915024	UMUM
38	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RAHMAT	*7372040511990001	Laki-Laki	SMA	Parepare 1999-11-05	Jl.Damai	Muara Jawa Ulu	Muara Jawa	081244358949	UMUM
39	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	M.FIRDAUS	*6402142008030001	Laki-Laki	SMK	Muara Jawa 2003-08-20	Jl.A.Yani. Rt.008	Muara Jawa	Muara Jawa	081346297724	UMUM
40	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD MAULANA	*6402071301030003	Laki-Laki	SMA	Sebulu 13-01- 2003	Jalan Abd.Samad.Ps	Sebulu Ulu	Sebulu	082252749235	UMUM
41	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ABU BAKAR QADAFI	*6402021211020003	Laki-Laki	SMA	Loa Kulu 2002-11-12	Jl Mulyo Pranoto Rt 05 Loh Sumber	Loh Sumber	Loa Kulu	085821710465	UMUM
42	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD ILHAM	*6402091009010001	Laki-Laki	MA	Semayang 2001-09-10	Semayang Rt 007 Kenohan	Semayang	Kenohan	081380096687	UMUM
43	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD IDUL	*6402041001000003	Laki-Laki	S1	Samarinda 2000-01-10	Tani Makmur Rt. 010	Muara Pantuan	Anggana	085247012981	UMUM
44	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	DION SAPUTRA	*6402042008010001	Laki-Laki	SMK	Bone 2001-08-20	Muara Ilo Barat	Tani Baru	Anggana	081343185191	UMUM
45	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RIZA FAZRIAN NOOR	6402061110900002	Laki-Laki	SMA	Tenggarong,11-10-1990	Jl.Loa Ipuh Gg.Dewi Sri No 63	Loa Ipuh	Tenggarong	085399003816	UMUM
46	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD DANARDIVA SADEWA	6402150401060000	Laki-Laki	SMK	Sangasanga 2006-01-04	Jl. Madrasah	Sanga-Sanga Dalam	Sanga Sanga	085175065545	UMUM
47	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ARIF BUDIMAN	*6402152702050002	Laki-Laki	SMK	Longmesangat 2005-02-27	Jl.Dr.Wahidin	Sanga-Sanga Dalam	Sanga Sanga	082296787252	UMUM
48	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SA'DAN	*6402171608040001	Laki-Laki	MA	Kersik 2004-08-16	Kersik	Kersik	Marang Kayu	081522644587	UMUM
49	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	AAN ALFIAN	*6402171501030002	Laki-Laki	SMA	Santan 2003-01-15	Pantai Indah	Sebuntal	Marang Kayu	085752927005	UMUM
50	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ARGA	6402061711951002	Laki-Laki	SMA	Tenggarong,17-11-1995	Jl.Danau Murung Rt 21	Melayu	Tenggarong	082152521155	UMUM
51	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD YUDHA BUSTANI ARIFIN	6402021108000003	Laki-Laki	SMA	Loa Kulu, 11-08-2000	Jl. Kartanegara Rt 1	Teluk Dalam	Tenggarong Seberang	089601100688	UMUM
52	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	M.FADIL FAJRIANSYAH	6402050912050002	Laki-Laki	SMK	Muara Badak,09-12-2005	Jl.Bina Raga Rt5	Muara Badak Ulu	Muara Badak	085299113239	UMUM
53	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD APRILLIANSYAH	64020529040600003	Laki-Laki	SMK	Tanjung Limau,29-04-2006	Jl.Sd Inpres Rt 1	Tanjung Limau	Muara Badak	082188865505	UMUM
54	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ADI SETIAWAN	6402010708020002	Laki-Laki	Islam	Batuq, 07 Agustus 2002	Desa Batuq Rt. 004	Desa Batuq	Muara Muntai	85393409731	P3KE
55	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ADAM PRAYOGA	6402081706040001	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 17 Juni 2004	Jl. Sri Bangun	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun		UMUM
56	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	AHMAD RIZKY DAMIL	6402012006070002	Laki-Laki	Islam	Samarinda, 27 Juni 2007	Jl. Dr. FI Tobing Rt. 004	Muara Muntai Ilir	Muara Muntai	82251657077	UMUM
57	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	AHMAD ROZALI	6402010301000003	Laki-Laki	Islam	Muara Kedang, 03 Januari 2000	Jl. Gajah Mada Rt. 003	Muara Muntai	Muara Muntai	82244267525	UMUM
58	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	AIDIL SAPUTRA	6402180107060015	Laki-Laki	Islam	Labak Cilong, 01 Juli 2006	Jl. Poros Rt. 005	Desa Lebak Cilong	Muara Wis	89526583237	UMUM
59	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	AKHMAD SURIYADI	6402082205980002	Laki-Laki	Islam	Liang, 22 Mei 1998	Jl. Awang Long Rt. 009	Kota Liang	Kota Liang	85253815445	UMUM
60	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ALPIAN	6402012508730001	Laki-Laki	Islam	Tenggarong, 22 Agustus 1975	Jl. Raya Sungai Jantur Rt. 010	Desa Jantur	Muara Muntai	82260485146	UMUM
61	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ANANDA AGUSMI	6402181408990001	Laki-Laki	Islam	Kuyung, 14 Agustus 1999	Desa Seberman Rt. 008	Desa Seberman	Muara Wis	82251600477	P3KE
62	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ANDI SAPUTRA	6402010107920028	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 14 Juni 2001	Muara Muntai Ilir Seberang Rt. 004	Desa Muara Muntai Ilir	Muara Muntai	82290708226	UMUM
63	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ARI SANJANI	64020114049000002	Laki-Laki	Islam	Rebag Rinding, 14 April 1990	Jl. Gang Rihuy Rahayu Rt. 005	Desa Muara Muntai Ulu	Muara Muntai	82251610195	UMUM
64	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ARYA	6402010109040001	Laki-Laki	Islam	Kayu Batu, 04 September 2004	Jl. Dr. Nazir Rt. 002	Desa Kayu Batu	Muara Muntai	81348925929	P3KE
65	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	BAGUS RAMADHAN	6402010107050008	Laki-Laki	Islam	Rebag Rinding, 18 Oktober 2005	Jl. Kh. Agus Salim Rt. 001	Desa Rebag Rinding	Muara Muntai	87828940296	P3KE
66	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	BINURIL FAHMI	6402010701040002	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 07 Januari 2004	Muara Muntai Ilir Seberang Rt. 004	Muara Muntai Ilir	Muara Muntai	87862416126	P3KE
67	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	DANNI	6402012010020002	Laki-Laki	Islam	Kayu Batu, 21 Oktober 2002	Jl. Dewi Sartika Rt. 006	Kayu Batu	Muara Muntai	82252620657	UMUM

NO	KEJURUAN	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	PEDIDIKAN TERAKHIR	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	DESA/KEKEL	KECAMATAN	NO HP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	DENY PUTRA	6402080212030002	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 02 Desember 2003	Jl. Mulawarman 2 Rt. 007	Desa Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	81353798664	UMUM
69	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	DICKY RIVALDI	6402011905000002	Laki-Laki	Islam	Kayu Batu, 19 Mei 2000	Desa Muara Leka Rt. 002	Muara Leka	Muara Muntai	85391071632	UMUM
70	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	FADLIANSYAH	6402012705010002	Laki-Laki	Islam	Rebag Rinding, 27 Mei 2001	Jl. Pangeran Hidayatullah Rt. 005	Desa Pulau Harapan	Muara Muntai	81340102465	P3KE
71	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	FHIKY SURYAWAN	6402082101060001	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 21 November 2006	Jl. Barong Tongkok Gg. Kubur Blok. A	Maluhu	Tenggarong	81349796436	P3KE
72	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	HAMDANI ANSYAH	6402010106000006	Laki-Laki	Islam	Jantur, 13 Oktober 1998	Jl. Pulau Karamat Rt. 006	Jantur	Muara Muntai	82219208518	P3KE
73	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	HELMI	6402010404850001	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 04 April 1989	Jl. Pulau Karamat Rt. 003	Jantur	Muara Muntai	81344764443	UMUM
74	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	HERI	6402010407980003	Laki-Laki	Islam	Rebag Rinding, 12 Febuari 1998	Jl. Kh. Agus Salim Rt. 005	Desa Rebag Rinding	Muara Muntai	82250864406	UMUM
75	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	HIDAYATULLAH	6402011108940003	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 11 Agustus 1994	Jl. Gajah Mada Rt. 002	Muara Muntai Ilir	Muara Muntai	82350643629	UMUM
76	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ICHWAN	7308144905980001	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 09 Mei 1998	Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 001	Muara Muntai Ulu	Muara Muntai	85321498758	P3KE
77	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ILHAM ADITYA	6402081507031003	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 15 Juli 2003	Jl. H. M Aini.H Rt. 16	Desa Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	82157119625	UMUM
78	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	INDRA KUSUMA	6402081605010001	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 16 Mei 2001	Jl. Rancang Rimba Ayu Rt. 010	Desa Kedang Murung	Kota Bangun	81346727758	UMUM
79	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	INDRIYANI	6402082206890001	Laki-Laki	Islam	Loleng, 22 Juni 1989	Jl. Kartini Rt. 002	Desa Loleng	Kota Bangun	85342386245	P3KE
80	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	IRFAN HAKIM	6402182203030001	Laki-Laki	Islam	Kuyung, 22 Maret 2003	Dusun Kuyung Rt. 008	Desa Sebemban	Muara Wis	82271332903	UMUM
81	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	M. FATHUR RAHMAN	6402042111101003	Laki-Laki	Islam	Sungai Meriam, 15 September 2001	Jl. Biawan Rt. 008	Muara Wis	Muara Wis	82148564266	P3KE
82	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	M. IFNU KUSUMA	6402084708060001	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 07 Agustus 2006	Jl. Mulawarman 2 Rt. 010	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	85247671868	P3KE
83	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	M. ZULKIFLI	6402080910870002	Laki-Laki	Islam	Sebelimbingan, 09 Oktober 1987	Jl. Mulawarman Rt. 002	Desa Sebelimbing	Kota Bangun	85250411148	UMUM
84	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	M.MALIKI	6402080306010003	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 03 Juni 2001	Jl. Mulawarman 1 Rt. 002	Desa Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	81254420613	P3KE
85	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MASRONI	6402010110910002	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 01 Oktober 1991	Jl. Gajah Mada Rt. 003	Muara Muntai Ilir	Muara Muntai	82154380565	UMUM
86	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SUHERMAN ARDIANSYAH	6402010902940001	Laki-Laki	Islam	Perian, 09 Februari 1994	Jl. Kartini Rt. 003	Perian	Muara Muntai	85249706339	UMUM
87	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD FAIZAL NUR SAPUTRA	6402080907020001	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 29 Maret 2003	Jl. H. M Aini Rt. 014	Desa Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	82350645205	UMUM
88	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD INSAN NAUFAL	-	Laki-Laki	Islam	Desa Tanjung Batuq Harapan Rt. 001	Tanjung Batuq Harapan	Tanjung Batuq Harapan	Muara Muntai	-	UMUM
89	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD OGI Satriawan	6402012229020001	Laki-Laki	Islam	Muara Leka, 22 September 2002	Desa Muara Leka, Rt. 003	Muara Leka	Muara Muntai	82251133409	UMUM
90	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD YUNUS	6402010606020001	Laki-Laki	Islam	Tanjung Batuq Harapan, 28 April 2002	Desa Tanjung Batuq Harapan Rt. 001	Desa Tanjung Batuq	Muara Muntai	82243327450	P3KE
91	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	MUHAMMAD ZAM ZAM	6402061610890002	Laki-Laki	Islam	Tenggarong, 16 Oktober 199	Jl. Jend. A Yani Rt. 12	Desa Muara Muntai Ulu	Muara Muntai	87796638648	UMUM
92	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	NASRULLAH	6402012006060002	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 20 Juni 2006	Jl. Dewi Sartika Rt. 003	Desa Kayu Batu	Muara Muntai	85249011345	P3KE
93	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RAHADI	6402010906960001	Laki-Laki	Islam	Jantur, 09 Juni 1996	Jl. Raya Sungai Jantur Rt. 009	Desa Jantur	Muara Muntai	81346827207	UMUM
94	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RIDUANSYAH	6402012308940001	Laki-Laki	Islam	Rebag Rinding, 23 Agustus 1994	Jl. Kh. Agus Salim Rt 002	Rebag Rinding	Muara Muntai	81939738894	P3KE
95	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RODIANSYAH	6402080205910001	Laki-Laki	Islam	Kota Bangun, 02 Mei 1991	Desa Kota Bangun Rt. 002	Kota Bangun Seberang	Kota Bangun	85757758848	UMUM
96	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	RUDI JULFIANSYAH	6402181704930001	Laki-Laki	Islam	Muara Enggelam, 17 September 1993	Dusun Kuyung Rt. 006	Desa Sebemban	Muara Wis	82157187758	UMUM
97	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	STEVANUS FONGKI	6402011604030001	Laki-Laki	Katholik	Muara Leka, 16 April 2003	Muara Leka Rt. 001	Muara Leka	Muara Muntai	82259729489	UMUM
98	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SAFARUDIN	6402010604020001	Laki-Laki	Islam	Batuq, 06 April 2002	Desa Batuq Rt. 004	Desa Batuq	Muara Muntai	85386234967	P3KE
99	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SAHIR	6402080807000001	Laki-Laki	Islam	Loleng, 08 Juli 2000	Desa Loleng Rt. 002	Desa Loleng	Kota Bangun	82250665163	P3KE
100	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SAHRUL	6402183011020001	Laki-Laki	Islam	Kuyung, 30 November 2002	Dusun Kuyung Rt. 008	Desa Sebemban	Muara Wis	85247267391	P3KE
101	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SULTANI ALFI	6402014405040001	Laki-Laki	Islam	Minta, 04 Mei 2004	Desa Perian Rt. 006	Desa Perian	Muara Muntai	82253673421	UMUM
102	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	SYAHRIL	6402011906970001	Laki-Laki	Islam	Tanjung Batuq, 19 Juni 1997	Tanjung Batuq Harapan Rt. 003	Desa Tanjung Batuq	Muara Muntai	85247986012	P3KE
103	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	TOMI RAMADHANI	6402012801970001	Laki-Laki	Islam	Muara Muntai, 28 Januari 1997	Jl. Gajah Mada Rt. 003	Muaramuntai Ilir	Muara Muntai	822190590275	UMUM
104	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	TONI	6402012303000001	Laki-Laki	Islam	Rebag Rinding, 23 Februari 2000	Jl. Kh. Agus Salim Rt. 005	Desa Rebag Rinding	Muara Muntai	82271450206	P3KE
105	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	WIRA	6402011802950003	Laki-Laki	Islam	Muara Leka, 18 Februari 1995	Desa Muara Leka Rt. 003	Desa Perian	Muara Muntai	82250213923	P3KE
106	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	YUSUF	6402012603040001	Laki-Laki	Islam	Kayu Bantu, 28 Maret 2004	Jl. Dewi Sartika Rt. 006	Desa Kayu Batu	Muara Muntai	81348554431	UMUM
107	PELATIHAN SECURITY GADA PRATAMA	ZAINAL	6402010501010003	Laki-Laki	Islam	Jantur, 05 Januari 2001	Jl. Pulau Karamat Rt. 002	Desa Jantur	Muara Muntai	82260485146	UMUM
108	OPERATOR AB	RUDI HARTONO	6402110707990004	Laki-Laki	S1	Bunga Jadi 1999-07-07	Jl Belimbing Rt 002 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman	Bunga Jadi	Muara Kaman	085249363568	P3KE
109	OPERATOR AB	DICKI DARMAWAN	6402082409020002	Laki-Laki	SMA	Liang 2002-09-24	Jl. P. Suta Kanan Desa Liang Kec. Kota Bangun	Liang	Kota Bangun	0822-5316-9291	P3KE
110	OPERATOR AB	YUDA ARTANTO	6402130812980002	Laki-Laki	S1	Samarinda 1998-12-08	Jl. Balikpapan Handil Ii Rt.04 Kel. Kampung Lama	Kampung Lama	Samboja	082148795159	P3KE
111	OPERATOR AB	MUHAMMAD ABDI RAHMATILLAH	6402072802020001	Laki-Laki	SMA	Sebulu 2002-02-28	Jln.Manunggal Rt.01	Sebulu Ulu		0857-5223-6718	UMUM
112	OPERATOR AB	JOE DENNISE HEART	6402152512050002	Laki-Laki	SMA	Samarinda 2005-12-25	Jl. Dr. Wahidin Rt.08	Sanga-Sanga Dalam	Sanga Sanga	0812-5818-7059	UMUM
113	OPERATOR AB	M. ZAIN IRFAN	6402060609010003	Laki-Laki	SMK	Tenggarong 2001-09-06	Jl.Ap.Mangkunegara	Teluk Dalam	Tenggarong Seberang	0878-8345-0252	UMUM
114	OPERATOR AB	GHOZI ROZAAN PRANADHAN	6402060411020006	Laki-Laki	SMK	Tenggarong 2002-11-04	Jalan Swadaya No.14 Rt/Rw 001/001	Bukit Biru	Tenggarong	0895-3487-29102	UMUM
115	OPERATOR AB	DAMAR ALIEF PRADIPTA	6402060708010008	Laki-Laki	SMA	Tenggarong 2001-08-07	Jl. Usaha Tani Perum Kendis Village Blok A7	Mangkurawang	Tenggarong	0813-5145-3177	UMUM
116	OPERATOR AB	DAMANG ARDIANTO	6402161906040002	Laki-Laki	SMA	Kutai Kartanegara 2004-06-19	Desa Bangun Rejo, Rt. 33,Kukar, Tenggarong Sebrang	Bangun Rejo	Tenggarong Seberang	0822-5298-6743	UMUM
117	OPERATOR AB	MUHAMMAD ANGGI ALWI	6402062805000001	Laki-Laki	SMK	Tenggarong 2000-05-28	Jl.Mj.Panjaitan Yg Ikhlas	Loa Ipuh	Tenggarong	0822-4603-5138	UMUM
118	OPERATOR AB	GUINA SAPUTRA	6402061102030001	Laki-Laki	SMK	Tenggarong 2003-02-11	Jl.Maduningrat No.57, Jl.Maduningrat Rt.16 No.57	Melayu	Tenggarong	0895-1992-4809	UMUM
119	OPERATOR AB	MUSTAKIM	6402010909020001	Laki-Laki	MA	Samarinda 2002-09-03	Desa Batuq	Batuq	Muara Muntai	0821-5387-1935	UMUM
120	OPERATOR AB	DHIMAS AKHYATUL IMAN	647203070700005	Laki-Laki	SMA	Samarinda / 07-07-2000	Jl. Rahmat Rt. 20	Gas Alam Badak I	Muara Badak	0838-7971-2436	UMUM
121	OPERATOR AB	ABDUL RAZAK	647421011930009	Laki-Laki	SMA	Muara Badak / 10-11-1994	Jl. Cokroaminoto Rt 25	Gas Alam Badak I	Muara Badak	0822-1748-7625	UMUM
122	OPERATOR AB	RIKI PURNOMO	6472060202010001	Laki-Laki	S1	Samarinda 2001-02-02	Jl.Batu Dinding Rt.019	Loa Tebu	Tenggarong	082213376904	UMUM
123	OPERATOR AB	IRVAN MAULANA	6402160909050001	Laki-Laki	SMK	Tenggarong 2004-09-09	Tenggarong Seberang, Bangun Rejo L3Blok A Rt 05	Bangun Rejo	Tenggarong Seberang	081349393944	UMUM
124	OPERATOR AB	KARIM	6304171801010002	Laki-Laki	SMA	Bakungan 2001-01-17	Bakungan Rt 1	Loa Janan	Tenggarong	082252207912	UMUM
125	OPERATOR AB	HUSNUL ANAM	6402170503990001	Laki-Laki	S1	Marangkayu 1999-03-03	Marangkayu Iii Rt 007 Desa Sebuntal	Sebuntal	Marang Kayu	082210230396	UMUM
126	OPERATOR AB	MUHAMMAD PADLI	6402172309990002	Laki-Laki	S1	Santan Ulu 1999-09-23	Dusun Wonorejo Rt 06	Santan Ulu	Marang Kayu	082198951174	UMUM
127	OPERATOR AB	ROBIN KURNIA	6402111506990002	Laki-Laki	S1	Sidomukti 1999-06-15	Jl. Belibis	Sidomukti	Muara Kaman	082261571905	UMUM
128	WELDER SMAW 3G	ANGGA SAPUTRA	6402080106050001	Laki-Laki	SMK	Kota Bangun 2005-05-01	Desa Sarinadi	Sari Nadi	Kota Bangun Darat	082353045365	P3KE
129	WELDER SMAW 3G	MAHENDRA ARDIANSYAH	6402061705030001	Laki-Laki	SMK	Rapak Lambur 2003-05-17	Dusun Pelita Rt. 17	Margahayu	Loa Kulu	082114256215	P3KE
130	WELDER SMAW 3G	M.FATHUR RAHMAN	6402042111010003	Laki-Laki	SMA	Sungai Mariam 2001-09-15	Jln. Biawan Rt 008	Muara Wis	Muara Wis	082191197282	P3KE
131	WELDER SMAW 3G	M KHAIRIN IKHSAN	6402041404060004	Laki-Laki	SMA	Sungai Mariam 2006-04-14	Jln. Biawan Rt 08	Muara Wis	Muara Wis	082136095438	P3KE
132	WELDER SMAW 3G	RAHMAT HIDAYAT	6402080703030001	Laki-Laki	SMK	Kota Bangun 2003-02-07	Kota Bangun 1	Kota Bangun I	Kota Bangun Darat	082170112270	P3KE
133	WELDER SMAW 3G	DICKY WILIARDI BREM	6402080409010003	Laki-Laki	SMA	Jakarta 2001-09-04	Dusun Tambah Rejo Rt.01Rw.01, Kota Bangun 1	Kota Bangun I	Kota Bangun Darat	081345909074	P3KE
134	WELDER SMAW 3G	SANDI	6402111701030003	Laki-Laki	SMA	Muara Kaman Ulu 2003-01-17	Dusun Delta Mahakam Rt 18	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	085350461608	P3KE
135	WELDER SMAW 3G	NUR RISMA ALDA HAZIZAH	6472025803000003	Perempuan	SMA	Samarinda 2000-05-18	Jl.Darussalam Handil 6	Muara Jawa Tengah	Muara Jawa	085705021557	P3KE
136	WELDER SMAW 3G	RENDY KURNIAWAN	6402110309040002	Laki-Laki	SMA	Tenggarong Seberang 2004-09-03	L2 Blok A Desa Karang Tunggal	Karang Tunggal	Tenggarong Seberang	083849805299	P3KE
137	WELDER SMAW 3G	AUDRIK ELROY	6402060802060005	Laki-Laki	SMK	Makassar 2006-02-08	Jl. Maduningrat No. 18	Melayu	Tenggarong	082155083909	UMUM
138	WELDER SMAW 3G	AL UZTAFATU RRAHMAN JABBAR	6402150103020002	Laki-Laki	SMK	Tenggarong 2002-03-01	Jln. Jend Sudirman	Sanga-Sanga Dalam	Sanga Sanga	081528823598	UMUM
139	WELDER SMAW 3G	ALDI GUNAWAN	6402110904000001	Laki-Laki	SMK	Muara Kaman,09 April 2000	Muara Kaman Ulu Rt.17	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	082114215416	UMUM
140	WELDER SMAW 3G	MICHAEL SAPANA	6471042406030003	Laki-Laki	SMK	Balikpapan 2003-06-24	Jl. Soekarno Hatta Km. 41 Rt. 25	Sungai Merdeka	Samboja Barat	08158277794	UMUM
141	WELDER SMAW 3G	MARWAN CANDRA SAPUTRA	6402181507970001	Laki-Laki	SMA	Samarinda 1997-07-15	Jl.H.M Bakrie Kedang Murung Rt 005	Kedang Murung	Kota Bangun	085134647844	UMUM
142	WELDER SMAW 3G	EKY PATINTINGAN	7315112806000002	Laki-Laki	SMK	Pinrang 2000-06-28	Pinrang 2000-06-28	Sebuntal	Marang Kayu	081345940404	UMUM
143	WELDER SMAW 3G	JANUARDI	6402110901030001	Laki-Laki	SMA	Muara Kaman 2003-01-09	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	081258023824	UMUM

**DATA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2025**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2025

NO	NAMA PEKERJA	TENAGA KERJA	NAMA PERUSAHAAN	HARI / TANGGAL PANGGILAN KLARIFIKASI	Mediator Hubungan Industrial	JAM	HARI / TANGGAL PANGGILAN I	Mediator Hubungan Industrial	JAM	HARI / TANGGAL PANGGILAN II	Mediator Hubungan Industrial	JAM	HARI / TANGGAL PANGGILAN II	Mediator Hubungan Industrial	JAM	KET.		
																ANJ	PB	GP
KASUS BULAN JANUARI																		
1	MITRA	1	PT. Tunas Prima Sejahtera	KAM, 09 JANUARI 2025	Firman Hidayat	10.00											ANJ	
2	Muhammad Afasy Ramadhan	1	PT. Syah Perdana Abadi	Kam, 23 Januari 2025	Firman Hidayat	10.00	Kamis, 30 Januari 2025	Firman Hidayat	10.00								ANJ	
3	Adnan Budibun	1	PT. Kayan Putra Utama Coal	Sel, 14 Januari 2025	Harlyana													PB
4	Rendra, dkk (4 orang)	4	PT. Upi Petronas Energi	Sen, 20 Januari 2025	Harlyana	10.00											ANJ	
5	Nando, dkk (5 orang)	5	PT. BUMA	Rab, 15 Januari 2025	Firman Hidayat													PB
6	Alfonsius Rani	1	PT. Hamparan sentosa	Sel, 14 Januari 2025	Desak Nyoman													PB
7	Org. Diana	1	PT. Maju Kalimantan H	Jum, 24 Januari 2025	Harlyana, SE	14.00											ANJ	
8	Aria Nur Zaman	1	PT. Masindo Inti Energi Perkasa	Sel, 04 Februari 2025	Harlyana	10.00												PB
9	Budi Asnawira	1	PT. Himmalita Kutai Makmur	Sen, 03 Februari 2025	Firman Hidayat	10.00											ANJ	
10	Sudarto Hata Putra, dkk 15 orang	15	PT. Scan Global Indonesia	Sel, 28 Januari 2025	Desak Nyoman	14.00												PB
11	Irenika Perti Jati	1	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Sen, 20 Januari 2025	Desak Nyoman	10.00												PB
KASUS BULAN FEBRUARI																		
1	Sufri	1	PT. Masindo Indenengy Perkasa	Rab, 12 Februari 2025	Firman Hidayat	10.00												PB
2	Bambang	1	Triunggag Sentra Buana	Kamis, 6 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00												PB
3	Naniang	1	Triunggag Sentra Buana	Kamis, 6 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00												PB
4	Gusti Zilane dkk (21 orang)	21	PT. Seta Solid Security	Kamis, 6 Februari 2025	Firman Hidayat	10.00	Kamis, 06 Februari 2025	Firman Hidayat		Kamis, 13 Februari 2025	Firman Hidayat	14.00					ANJ	
5	Padi, dkk (3 orang)	3	PT. Senani Fajar Bersama Sejahtera	Rabu, 5 Februari 2025	Firman Hidayat	13.30	Senin, 10 Februari 2025	Firman Hidayat	13.30	Senin, 17 Februari 2025	Firman Hidayat	13.30	Senin, 24 Februari 2025	Firman Hidayat	13.30		ANJ	
6	Sularta, dkk (15 orang)	15	PT. Scan Global Indonesia	Sel, 11 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00												PB
7	Budi Asnawira	1	PT. Himmalita Kutai Makmur	Sen, 30 Februari 2025	Firman Hidayat	10.00											ANJ	
8	Org. Diana	1	PT. Maju Kalimantan H	Jum, 24 Januari 2025	Harlyana, SE	14.00	Kamis, 13 Februari 2025	Harlyana	10.00								ANJ	
9	Bernadete Berek Ota	1	PT. Sawit Kalim Lestari	Kamis, 13 Februari 2025	Firman Hidayat	10.00											ANJ	
10	Rendra, dkk (4 orang)	4	PT. Upi Petronas Energi	Sen, 20 Januari 2025	Harlyana	10.00							Senin, 17 Feb 2025	Harlyana	10.00		ANJ	
11	Mahmud Ishaq B	1	PT. Segara Pernal	Sel, 18 Februari 2025	Firman Hidayat	14.00	Jumat, 28 Februari 2025	Firman Hidayat	14.00								ANJ	
12	Rina	1	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Senin, 24 Februari 2025	Harlyana, SE	10.00	Kamis, 06 Maret 2025	Harlyana	10.00								ANJ	
13	Satri Dal Pramesti	1	PT. Masindo Indenengy Perkasa	Selasa, 25 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00												PB
14	Oktavianus Siman dan Florentina Yulida Setia	2	PT. Agrojaya Tirta Kencana				Kamis, 27 Februari 2025	Desak Nyoman	10.00								ANJ	
15	Oktavianus Yolin, Yohanes Nemor dan Patri Penggal	3	PT. Agrojaya Tirta Kencana				Kamis, 27 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00								ANJ	
16	Bennyamin Gondrong dan Marta Yuliana Ratu	2	PT. Agrojaya Tirta Kencana				Kamis, 27 Februari 2025	Desak Nyoman	09.30									
17	Fery	2	PT. Kencana Mulia Barutama	Rabu, 19 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00	Rabu, 12 Maret 2025	Desak Nyoman	14.00									PB
18	Sulianto	1	PT. Bina Sarana Sukos	Senin, 24 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00												PB
19	Derry	1	PT. Bina Sarana Sukos	Senin, 24 Februari 2025	Desak Nyoman	14.00												PB
KASUS BULAN MARET																		
1	Bernadete Berek Ota	1	PT. Sawit kalim Lestari				Selasa, 04 Maret 2025	Firman Hidayat	10.00								ANJ	
2	Rina	1	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Senin, 24 Februari 2025	Harlyana, SE	10.00	Kamis, 06 Maret 2025	Harlyana	10.00	Senin, 17 Maret 2025	Harlyana	10.00	Rabu, 16 April 2025	Harlyana	10.00		ANJ	
3	Ivelly Febrany	1	PT. Cahaya Fajar Kalim	Senin, 03 Maret 2025	Harlyana, SE	10.00	Senin, 10 Maret 2025	Harlyana	10.00								ANJ	
4	Oktavianus Siman dan Florentina Yulida Setia	2	PT. Agrojaya Tirta Kencana				Senin, 03 Maret 2025	Desak Nyoman	10.00								ANJ	



Yohanes Yohanes, Yohanes dan Patris Panggal	2	PT. Agrojaya Tirta Kencana				Senin, 03 Maret 2025	Desak Nyoman	14.00								AMU	
Benyamin Gondrong dan Maria Yuliana Ratu	2	PT. Agrojaya Tirta Kencana				Senin, 03 Maret 2025	Desak Nyoman	09.30								AMU	
Lamhasan Nainggolan	1	PT. Karya Dhanu Makmur	Kamis, 13 Maret 2025	Desak Nyoman	13.00											AMU	
Uwal Hakim, Satri Rati, Munoz Y dan Jalmansyah	4	PT. Wahana Bermartabat Indonesia	Selasa, 11 Maret 2025	Harlyansa, SE	10.00	Senin, 21 April 2025	Harlyansa	10.00								AMU	
Martius Kelana	3	CV. Tepian Jawa	Selasa, 11 Maret 2025	Firman Hidayat	10.00	Selasa, 29 April 2025	Firman Hidayat	13.00								AMU	
Novandra Eko Putra, ST	1	PT. Srikindi Batanghari Indonesia	Selasa, 18 Maret 2025	Desak Nyoman	11.00	Selasa, 29 April 2025	Desak Nyoman	10.00								AMU	
Eman Sigalingging	1	PT. Titi Trans Energi	Kamis, 13 Maret 2025	Firman Hidayat	10.00	Selasa, 18 Maret 2025	Firman Hidayat	10.00	Senin, 14 April 2025	Firman Hidayat	10.00					AMU	
Merkus Sale	1	PT. Bukit Bakti Energi	Selasa, 18 Maret 2025	Harlyansa, SE	10.00	Selasa, 22 April 2025	Harlyansa	10.00								AMU	
Andi Setiawan	1	PT. Kusma Wahana Nusa				Sen, 10 Februari 2025	Firman Hidayat	10.00								AMU	
KASUS BULAN APRIL																	
Sekel Rasyid Fakhreza	1	PT. Tusas Prima Sejahtera	Rabu, 28 Maret 2025	Firman Hidayat	10.00											AMU	
Sekel Pekerja Perkebunan	2	PT. Cahaya Anugerah Plantations				Rabu, 13 Maret 2025	Firman Hidayat	13.30	Senin, 05 Mei 2025	Firman Hidayat	13.30					AMU	
Hendra Wijaya	1	PT. Elasya Purnama Sari	Senin, 24 Maret 2025	Firman Hidayat	10.00	Selasa, 22 April 2025	Firman Hidayat	10.00								AMU	
Hamsah	1	PT. Multi Karya Pratama				Rabu, 16 April 2025	Firman Hidayat dan Desak	10.00								AMU	
Ikaser Simon dik	3	CV. Multindo Prima Tehnik	Senin, 21 April 2025	Firman Hidayat	10.00	Rabu, 07 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00								AMU	
Eddy Firmanto	1	PT. Elasya Purnama Sari	Selasa, 22 April 2025	Firman Hidayat	11.00	Selasa, 29 April 2025	Firman Hidayat	13.30	Rabu, 21 Mei 2025	Firman Hidayat						AMU	
Herman F.M.B	1	PT. Kanala Amada	Rabu, 23 April 2025	Firman Hidayat	13.30											AMU	
Hetani	1	PT. Hamparan Sentosa				Jumat, 11 April 2025	Firman, Desak	13.30	Selasa, 29 April 2025	Firman, Desak	14.00					AMU	
Dyarl	1	PT. Bina Sarana Sukses	Senin, 28 April 2025	Firman Hidayat	10.00											AMU	
Samuel Ta'e	1	PT. Katali Agro Jaya	Kamis, 24 April 2025	Harlyansa, SE	10.00											AMU	
Syamsudin	1	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Senin, 28 April 2025	Harlyansa, SE	10.00	Senin, 05 Mei 2025	Harlyansa	10.00								AMU	
Stephanus	1	PT. Rea Kalim Plantations	Senin, 24 Maret 2025	Desak Nyoman	14.00											AMU	
Arnol Galang	1	PT. Rea Kalim Plantations				Rabu, 28 April 2025	Harlyansa	10.00	Senin, 05 Mei 2025	Harlyansa	13.30					AMU	
KASUS BULAN MEI																	
Maria Regina Suring dan Alfonso Rati	1	PT. Hamparan Sentosa				Senin, 05 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00								AMU	
Ariel Sasmita	1	PT. PDAM				Selasa, 06 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00	Kamis, 22 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00					AMU	
Muhammad Arsyid	1	PT. Tri Mandiri Jaya U - BBE				Selasa, 29 April 2025	Desak Nyoman	14.00	Senin, 19 Mei 2025	Desak Nyoman	14.00	Senin, 16 Juni 2025	Desak Nyoman	14.00		AMU	
Krona Baya Catur, dik (8 orang)	8	PT. Brawijaya Prima Coal Indo	Rabu, 30 April 2025	Desak Nyoman	11.00											AMU	
Sugito	1	PT. Harapan Wahyu Abadi	Rabu, 07 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00	Selasa, 20 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00								AMU	
Handi Guna	1	PT. Rea Kalim Plantations				Kamis, 08 Mei 2025	Desak Nyoman	14.00								AMU	
Rolling Simanjuntak	1	PT. Jaya Mandiri Sukses	Rabu, 07 Mei 2025	Firman Hidayat	13.30	Selasa, 20 Mei 2025	Firman Hidayat	13.30								AMU	
Agas Prayitno dan Agusmawanto	2	PT. Himulita Kutai Makmur				Senin, 10 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00								AMU	
Sodik Saputra, dik (3 orang)	3	PT. Himulita Kutai Makmur				Senin, 10 Mei 2025	Firman Hidayat	10.00								AMU	
Uaki Uliya dan Yenni Achayati	2	PT. Sahana Energi Persada	Selasa, 20 Mei 2025	Desak Nyoman	14.00											AMU	
Suwandi	1	PT. Sri Kresno Agung Jaya	Selasa, 27 Mei 2025	Desak Nyoman	14.00											AMU	
Sutryono (Abil Wani Sutini)	1	PT. Mega Jasa Karya Bersama	Selasa, 27 Mei 2025	Desak Nyoman	10.00											AMU	
Hecol, SH	1	PT. Cipta Kridatama				Senin, 16 Juni 2025	Harlyansa	10.00								AMU	
Muriati Tolayub	1	PT. Agri Eastborne Kencana	Selasa, 27 Mei 2025	Desak Nyoman	10.00											AMU	
Sutarno	1	PT. Sri Kresno Agung Jaya	Selasa, 27 Mei 2025	Desak Nyoman	10.00											AMU	
KASUS BULAN JUNI																	
Nasyah	1	PT. Agri Eastborne Kencana				Selasa, 10 Juni 2025	D, F, A	10.00								AMU	
Saeul	1	PT. RPP Contractors Indonesia	Selasa, 10 Juni 2025	D, F, A	10.00											AMU	
Daniel Masli	1	PT. Thies Contractors Indonesia				Rabu, 18 Juni 2025	D, F, A	10.00	Jumat, 20 Juni 2025	D, F, A	09.00					AMU	
Tahang	1	PT. Agri Eastborne Kencana	Rabu, 18 Juni 2025	D	10.00											AMU	
Simon Petrus, dik (28 orang)	28	PT. Aa Mega Perkasa	Rabu, 18 Juni 2025	D, F	10.00											AMU	





Winda dan Arbaen	3	PT. NUSAM BERMABTIBAT INDONESIA			Rabu, 15 Juni 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
Benjamin, dkk (9 orang)	9	PT. NUSAM BERMABTIBAT INDONESIA			Rabu, 15 Juni 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
KASUS BULAN JULI																		
1. Irmal, dkk (17 orang)	17	PT. Kantara Mitra Jaya Utama			Selasa, 15 Juli 2025	Haryansa	14.00											PB
2. Herianto	1	PT. Maja Kalimantan Hadapan			Senin, 21 Juli 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
3. Sifatur Rohman	1	PT. Maja Kalimantan Hadapan			Senin, 21 Juli 2025	Firman Hidayat	11.00											PB
KASUS BULAN AGUSTUS																		
1. Floi Pindu Anastia A.	1	PT. Agri Eastbernea Kencana			Kamis, 14 Agustus 2025	Firman Hidayat	10.00	Selasa, 05 Sept 2025	Firman Hidayat	13.30							ANU	
2. Rahwan, dkk (4 orang)	4	PT. Insani Rara Perkasa			Kamis, 14 Agustus 2025	Firman Hidayat	13.30										ANU	
3. Odi Irmal Sau, Finsensius Tabis, Hendrikus A.	3	PT. Hamparan Semosa			Rabu, 27 Agustus 2025	Haryansa	10.00										ANU	
4. Ni Wayan S.	1	PT. Thilee Contractors Indonesia			Selasa, 26 Agustus 2025	Haryansa	11.00										ANU	
5. Sahadudin Anyori	1	PT. Sumalinda Hutani Jaya			Rabu, 20 Agustus 2025	Firman Hidayat	13.30										ANU	
6. Ambrosius Bhajo (52 orang)	52	PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa			Selasa, 02 Sept 2025	Firman Hidayat	13.30										ANU	
7. Bagas Putra Pratama, dkk (18 orang)	18	PT. Sinar Tenggara Inel Mulya			Kamis, 28 Agustus 2025	Desak Nyoman	10.00										ANU	
8. Adli Fith	1	PT. Hamparan Semosa			Kamis, 04 Sept 2025	Firman Hidayat	13.30										ANU	
9. Kudi	1	PT. Bina Nusa Internasional			Senin, 08 Sept 2025	Firman Hidayat	13.30										ANU	
KASUS BULAN SEPTEMBER																		
1. Turini dan Faidah	2	PT. Indorasa Surya Nusantara	Selasa, 10 Sept 2025	Firman Hidayat	10.00												ANU	
2. Gordianus, dkk (3 orang)	3	PT. Hamparan Semosa			Senin, 15 Sept 2025	Haryansa	13.30										ANU	
3. Willy Ricardo AS	1	PT. Agri East Kencana	Rabu, 11 Sept 2025	Firman Hidayat	10.00													PB
4. Bobby Arisandi	1	PT. Bina Sarana Sukses			Selasa, 16 Sept 2025	Firman Hidayat	13.30										ANU	
5. Rakib Bill Dama	1	PT. Cipta Kridama	Rabu, 18 Sept 2025	Firman Hidayat	10.00													PB
6. Taove	1	PT. Alhani Corona Lestari			Senin, 24 Sept 2025	Desak Nyoman	13.30											PB
7. Nurriyana, dkk (7 orang)	7	PT. Pelayaran Kencana Dwinitra			Senin, 06 Oktober 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
KASUS BULAN OKTOBER																		
1. Masamah	1	PT. Fajar Cahaya Kalim	Rabu, 08 Oktober 2025	Firman Hidayat	10.00													PB
2. Paulina Din	1	PT. Sawit Kalim Lestari			Kamis, 30 Oktober 2025	Desak Nyoman	10.00											PB
3. Ruslan	1	PT. Rea Kalim Plantations			Jumat, 17 Oktober 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
4. Dedi Kasa	1	PT. Sawit Kalim Lestari	Senin, 27 Oktober 2025	Haryansa, SE	10.00													PB
5. Supriadi dan Reski	2	PT. Cahaya Anugerah Plantations			Rabu, 20 Oktober 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
6. Ihsan Debolar	1	PT. Bintang Linda Nusantara			Senin, 03 Nov 2025	Firman Hidayat	10.00											PB
7. Kurniah	1	PT. Alam Jaya Pansada			Senin, 03 Nov 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
8. Egi Julian	1	PT. Bina Sarana Sukses			Senin, 03 Nov 2025	Haryansa	13.30	Senin, 10 Nov 2025	Haryansa, SE	10.00	Senin, 24 Nov 2025	Haryansa					ANU	
KASUS BULAN NOPEMBER																		
1. Alpanayah	1	PT. Maja Kalimantan Hadapan			Kamis, 6 Nov 2025	Firman Hidayat	10.00											OP
2. Bone	1	PT. Seseña Yedha Bhakti	Selasa 18 Nov 2025	Firman Hidayat	10.00													OP
3. Nurhidayah	1	PT. Rea Kalim Plantations	Selasa 18 Nov 2025	Firman Hidayat	10.00													OP
4. Tamin, dkk 9 orang	9	PT. Bina Sarana Sukses	Rabu, 13 Nov 2025	Firman Hidayat	14.00													OP
5. Sulaiman, dkk (6 orang)	6	PT. BUMA	Kamis, 6 Nov 2025	Firman Hidayat	14.00													OP
6. Samsul Jaelani	1	PT. Cahaya Anugerah P.			Senin, 17 Nov 2025	Firman Hidayat	10.00										ANU	
7. Duvrah	1	PT. Rea Kalim Plantations			Jumat, 21 Nov 2025	Desak Nyoman	14.00											OP
8. Nunung	1	PT. Saena Yucha Bhakti			Jumat, 21 Nov 2025	Desak Nyoman	10.00											OP





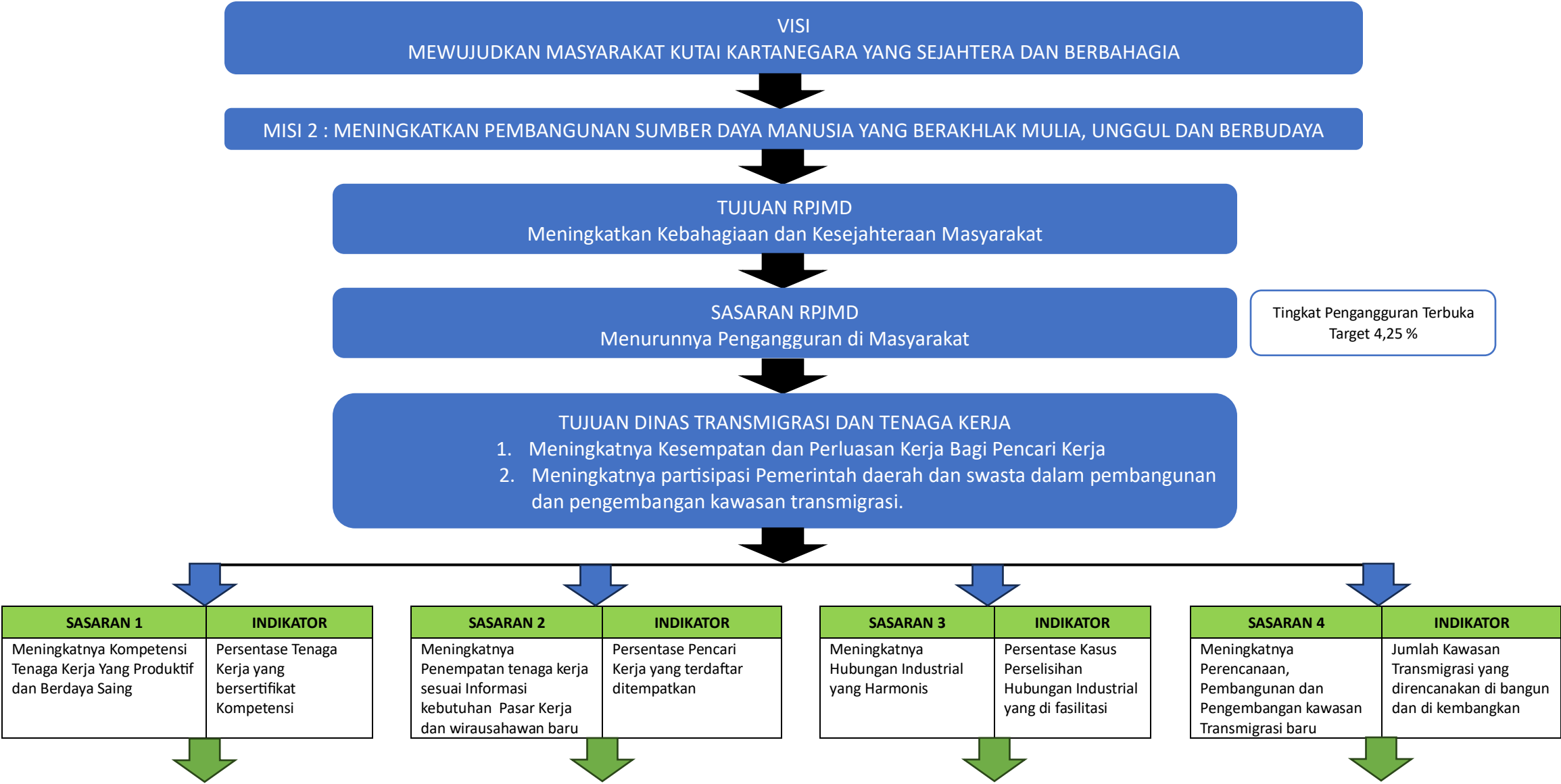
**PENATA LAYANAN OPERASIONAL
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

ANDRI LUKMAN H., SE,
NIP. 19850903202521 1 027

TENGSRONG, 15 DESEMBER 2025

 KEPALA BIDANG PENGURANGAN INDUSTRIAL
 HJ. SUHARNINGSIH, SH., MM
 NIP. 195601811994032005

CASCADING 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA





BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifika Kompetensi
Target : 24,34 %	



KEGIATAN	INDIKATOR
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Tersedia



BIDANG PERENCANAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja di Wilayah Kecamatan
Target : 100 %	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam/luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten
Target : 12,35 %	



KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Antar Kerja



BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL			BIDANG TRANSMIGRASI	
PROGRAM	INDIKATOR		PROGRAM	INDIKATOR
Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas		Program Perencana Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan
Target : 100 %			Target : 2 Dokumen	



KEGIATAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi Pembangunannya dan Pembinaannya
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans



Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang Dikembangkan
Target : 3 Dokumen	

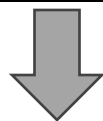


KEGIATAN	INDIKATOR
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Produktif
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas



SUB KEGIATAN	
1.	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
4.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

KEGIATAN	INDIKATOR
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja

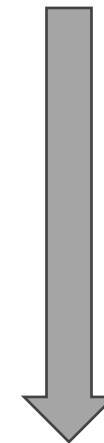


SUB KEGIATAN	
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
3.	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
4.	Pelayanan Antar Kerja
5.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

KEGIATAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR
Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				



SUB KEGIATAN	
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
3.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada



SUB KEGIATAN	
1.	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
2.	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
3.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

SUB KEGIATAN

SUB KEGIATAN	
6.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
7.	Perluasan Kesempatan Kerja
8.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
9.	Job Fair/Bursa Kerja

SUB KEGIATAN	
	Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
7.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
8.	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja

SUB KEGIATAN

Tenggarong, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara


M. Hatta, SE, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620815 200012 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencanan Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

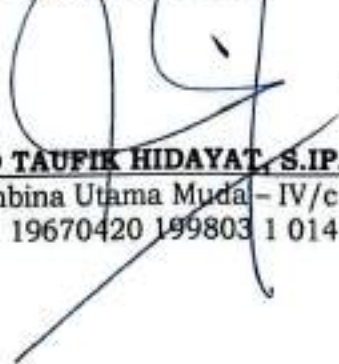
Kutai Kartanegara, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	24,34
2	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	12,35
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas	Persen	100
4	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	5
5	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
6	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
7	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30 (Baik)
8	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah.	Level	3
10	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

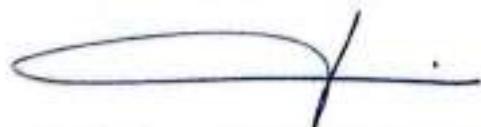
No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
11	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
13	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
14	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
15	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
16	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
17	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
18	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 12.605.992.012	APBD-P
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 148.167.500	APBD-P
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 3.943.833.400	APBD-P
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 7.194.047.540	APBD-P
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 8.848.883.950	APBD-P
6.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 131.386.100	APBD-P
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 350.151.560	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 33.222.462.062	

Kutai Kartanegara, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama,
Prt. KEPALA DINAS



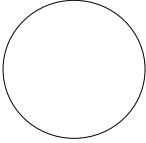
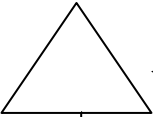
AKHMAD TAUFIK Hidayat, S.IP., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	Desember 2022
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	Maret 2023
		Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
		Nama SOP	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Kepala Bidang Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Pejabat Fungsional Perencana 5. Jabatan Pelaksana 6. Operator	
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2014. Tentang. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
3.	PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja		
4.	Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
5.	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah		
6.	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Kontrak Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
		1. Program Kerja 2. Peraturan terkait Evaluasi AKIP 3. Komputer / Laptop	
Peringatan		Pencatatan Dan Pendataan	
Laporan Hasil Evaluasi Sakip harus diterbitkan 5 (Lima) Hari setelah selesai melakukan evaluasi		Disimpan sebagai data elektronik dan Manual	

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Tim Evaluasi	Sekretaris DISTRANSNAKER	Kepala Dinas	Pejabat Struktural, Fung. Dan Pelaksana	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pendokumentasian Data dan melakukan Analisis Data serta menginterpretasikan bahan dan data berdasarkan Indikator LKE (Lembar Kerja Evaluasi) berdasarkan Permenpan No. 88 Tahun 2021	<pre>graph TD; Start([Start]) --> TimEvaluasi[Tim Evaluasi]; TimEvaluasi -- 1 --> Sekretaris[Sekretaris DISTRANSNAKER]; Sekretaris -- 2 --> TimEvaluasi; TimEvaluasi -- 3 --> KepalaDinas[Kepala Dinas]; KepalaDinas -- 4 --> TimEvaluasi; TimEvaluasi -- 5 --> End([End]);</pre>					LKJIP SKPD, Renja.RKT, Realisasi Kinerja, Renstra SKP Dokumen hasil Rapat Evaluasi dan dokumen lainnya	1 Tahun	Bahan dan Data yang akan dijadikan Eviden	
2.	Pembahasan bahan dan Data yang telah terkumpul dan dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan masing-masing variable, komponen, sub komponen serta kreteria penilaian AKIP						Variabel, Komponen, Sub Komponen dan kreteria penilaian AKIP berdasarkan Permenpan No. 88 Tahun 2021	Per Triwulan	Notulen Hasil Rapat Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan	
3.	Melaporkan kepada Kepala Dinas hasil pembahasan terkait bahan dan data yang terkumpul berdasarkan Variabel, komponen, sub komponen dan kreteria penilaian AKIP untuk dikomunikasikan kepada Pejabat Struktural, Fungsional, PPTK dan Pelaksana dalam pemenuhan eviden yang masih kurang						Dokumen Hasil LHE Inspektorat	1 Hari	Dokumen Laporan dan Noten Rapat serta BA hasil Pembahasan	

4.	Penginputan Eviden pada Aplikasi E-SAKIP dan Link yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan Penilaian Evaluasi AKIP						Eviden SAKIP, Aplikasi E-SAKIP dan Link Evaluasi AKIP	1 Minggu	Eviden telah terinput pada Aplikasi E-SAKIP dan Link Evaluasi AKIP	
5.	Melaporkan Kepada Kepala Dinas hasil LHE (Laporan Hasil Evaluasi) AKIP yang telah dikeluarkan oleh Perangkat Dearah yang melakukan Penilaian				6		Dokumen Laporan TIM Evaluasi hasil LHE	1 hari	Catatan dan Arahan Kepala Dinas untuk tindak lanjut	
6.	Mengkomunikasikan dan Melakukan Pembahasan Bersama (seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana) atas Hasil LHE AKIP untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan sebagai bentuk pengendalian Internal			7 			Dokumen Hasil LHE AKIP dan hasil Analisis TIM Evaluasi	2 Hari	Notulen Rapat dan Berita Acara Hasil Pembahasan LHE AKIP dan Nota Dinas Kepala Dinas sebagai tindak Lanjut Perbaikan	